

BAB III

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN



FRAME REPUBLIKA: Kasus Sapi Menguji Komitmen dan Kredibilitas PKS Sebagai Partai Bersih yang Anti Korupsi.

Politik dewasa ini tidak lagi dijadikan sebagai alat untuk menyahterakan rakyat, namun sebagai tujuan untuk mencapai jabatan dan kekuasaan. Partai politik sebagai salah satu instrumen politik juga sering bersikap tidak konsisten terhadap pendirian dan ideologi yang dianut, selalu berubah-ubah tergantung kepentingan yang berlangsung pada masanya. Petinggi partai, para kader, dan simpatisan pun lebih mengedepankan kepentingan pribadi dengan menonjolkan sikap hedonis daripada memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Kepentingan pribadi yang ditonjolkan para politisi ini contohnya dapat dilihat dari maraknya kasus korupsi yang terungkap.

Salah satu kasus korupsi yang mengejutkan masyarakat di awal Februari 2013 kemarin berasal dari Partai Keadilan Sejahtera. Mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, diduga memanfaatkan kekuasaannya demi memuluskan permintaan alokasi lebih dalam program swasembada daging di Kementrian Pertanian. *Republika* sebagai salah satu media nasional ikut menyoroti dampak yang umumnya akan ditanggung oleh parpol yang kadernya ketahuan korupsi, seperti prediksi turunnya elektabilitas dan

menurunkan banyak pemberitaan mengenai dukungan dan pembelaan terhadap PKS

Bagi *Republika*, kasus sapi tidak dilihat sebagai senjata untuk menyerang atau menjatuhkan PKS, namun sebagai ujian terhadap PKS dalam membuktikan kredibilitasnya sebagai partai bersih yang anti korupsi. *Republika* menilai PKS cukup layak mendapat kesempatan kedua apabila berhasil menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan menguatkan konsolidasi antar kader demi menyambut pertarungan politik di Pemilu 2014. Terhitung ada 12 berita dari *Republika* yang berkaitan dengan konstruksi PKS dalam kasus suap kuota impor daging sapi. Berita-berita tersebut terbagi atas wawancara, analisis, dan opini tunggal.

Tabel 4

Tanggal, Judul dan Penempatan Pemberitaan Konstruksi PKS Pada Kasus Suap Impor Daging Sapi di *Republika*

Tanggal	Judul Berita	Penempatan Berita
1 Februari 2013	PKS di Posisi Sulit	Rubrik Nasional, hal. 3
	Tantangan PKS	Rubrik Opini, hal. 4
2 Februari 2013	Momentum Berbenah Diri	<i>Headline</i> , hal. 1
	Kader PKS Usulkan Keluar Setgab	Rubrik Nasional, hal. 3
3 Februari 2013	Luthfi Mengaku Tak Tahu	<i>Headline</i> , hal. 1

4 Februari 2013	Parpol Islam Mesti Berbenah	Rubrik Nasional, hal. 3
	Gerus Simpatisan	Rubrik Nasional, hal. 3
11 Februari 2013	Konvensi Parpol Islam Mendesak	Rubrik Nasional hal. 3
20 Februari 2013	Geopolitik PKS	Rubrik Opini, hal. 4
27 Februari 2013	Prospek Partai Islam	Rubrik Opini, hal. 4
30 Maret 2013	Partai Islam dalam Survei	Rubrik Opini, hal. 4
16 Mei 2013	PKS Nilai KPK Istimewakan	Rubrik Nasional, hal. 2
	Demokrat	

Sumber: Pilihan koran *Republika* rentang edisi 31 Januari 2013 – 31 Mei

2013, diolah kembali oleh peneliti.

a. ***Problem Identification***

Pada realitas sosial, PKS memang beberapa kali menjadi sorotan media lantaran seringkali bersebrangan pendapat dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal itu terus terjadi meski PKS berstatus sebagai anggota Sekretariat Gabungan yang berkoalisi dengan pemerintah. Dalam dunia politik, koalisi mengartikan bahwa pihak-pihak terkait seharusnya ikut mendukung kebijakan yang dikeluarkan dan bukannya malah bersebrangan pendapat seperti yang sering dilakukan oleh PKS. Selain itu, berkembangnya isu perpecahan faksi di tubuh internal partai yang terbagi antara Keadilan dan Kesejahteraan juga kerap menjadikan PKS sebagai bahan

Terlepas dari benar atau tidaknya isu-isu tersebut, namun perpecahan faksi dan perbedaan pendapat seringkali membuat banyak petinggi maupun kader yang memutuskan untuk mengambil jarak bahkan keluar dari PKS. Dukungan dari simpatisan pun semakin berkurang karena saat ini PKS dinilai sudah bersikap pragmatis, artinya tidak lagi berpegang pada ideologi partai yang sejak awal dikenal sebagai partai dakwah. Kekecewaan kader maupun simpatisan mengenai hal tersebut semakin diperkuat dengan keputusan PKS yang memilih untuk menjadi partai terbuka, hingga pada akhirnya membuat masyarakat umum berasumsi bahwa ideologi PKS telah bergeser menjadi partai massa yang hanya berorientasi pada banyaknya dukungan suara.⁵²

Penyebab lain yang seringkali menjadikan PKS sebagai sorotan media dan masyarakat umum adalah keterkaitannya dengan kasus korupsi, bedanya citra PKS dianggap tidak sama dengan partai lain yang sudah sering ketahuan melakukan korupsi. Narasumber *Republika* mengeluarkan pernyataan yang mengarah pada aspek tersebut dalam rubrik Opini di edisi 1 Februari 2013 yang berbunyi, "*Dalam berbagai catatan kasus korupsi, sangat jarang kader PKS didera kasus korupsi. Berbeda dengan kader-kader dari partai besar lainnya.*" Nampaknya, isu kepercayaan inilah yang menjadi salah satu alasan *Republika* untuk mendukung *frame* PKS, khususnya dalam dugaan kasus korupsi suap impor daging sapi.

Hal ini dapat dibuktikan dari kesediaan *Republika* memberikan alokasi lebih besar mengenai banyaknya dukungan serta beragam faktor pendorong yang secara tidak langsung memposisikan PKS sebagai pihak yang tidak bersalah dalam kasus sapi. Dengan kata lain, *Republika* ingin menunjukkan bahwa kasus sapi bukanlah hal besar yang bisa menjatuhkan citra PKS. Meski begitu, *Republika* tetap memprediksi kemungkinan terburuk yang akan menimpa PKS bila tidak menyikapi kasus sapi secara hati-hati. Prediksi *Republika* tersebut terletak pada *lead* berita edisi 1 Februari 2013 “**PKS di Posisi Sulit**” yang bunyinya, “*JAKARTA – Kasus dugaan korupsi yang menimpa Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq diperkirakan akan berdampak besar bagi perolehan suara PKS pada Pemilu 2014.*”

Meski beberapa kader merasa geram dengan tuduhan keterkaitan mantan presiden partainya dengan kasus sapi, namun sejauh ini PKS dinilai sudah cukup kooperatif dengan menyerahkan kasus dugaan suap itu sepenuhnya kepada KPK, tentunya dengan menaruh harapan agar proses peradilan dapat berjalan dengan seimbang dan adil. Selain itu, langkah penyelamatan awal PKS yang langsung mengisi jabatan Presiden PKS yang sempat kosong dinilai sudah cukup tepat bagi publik. Saat ini yang sebaiknya diutamakan adalah menguatkan internal partai, seperti yang disampaikan salah seorang peneliti dari lembaga survey berikut ini:

Menurut dia, PKS masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk membenahi kondisi partai. Langkah PKS, segera melakukan pergantian pengurus dinilainya tepat. Solidaritas partai bisa segera dirapatkan dan tidak ada jeda yang lama untuk terjebak dalam

Republika juga menampilkan sebuah analisis mengenai mencuatnya kasus sapi dan hubungannya dengan PKS dari sudut pandang seorang dosen sosiologi di perguruan tinggi Jakarta.⁵³ Pertama, kasus sapi dinilai sebagai ajang pembuktian dan pertarungan bagi kredibilitas PKS. Kedua secara politik, kasus sapi dilihat sebagai sebuah alarm peringatan bagi PKS dalam menyongsong Pemilu 2014. *Republika* melihat inilah tantangan sesungguhnya yang harus berani dijawab oleh PKS yang sejak pascas Orde-Baru berani berkomitmen mengusung jargon bersih dan peduli. Bila PKS jeli mencermati kasus sapi secara kritis, maka seharusnya ini adalah waktu yang tepat untuk menggabungkan kembali kekuatan kader dari tingkat daerah hingga pusat.

Para pengurus PKS disarankan untuk bekerja keras menjadikan kasus sapi sebagai momentum untuk berbenah diri. Salah satunya dengan menyolidkan para kader yang diberikan pemahaman mengenai duduk perkara kasus Luthfi lewat program Safari Dakwah yang sekarang digalakkan kembali oleh Anis Matta. Para kader juga harus meyakinkan publik bahwa kasus Luthfi adalah yang terakhir bagi PKS. Bila konsolidasi antar kader maupun secara struktural partai terjalin dengan baik, maka diharapkan PKS bisa menghadapi berbagai ajang pemilukada selama 2013 sambil menyiapkan amunisi untuk menyambut Pemilu 2014.

Hidayat Nur Wahid selaku petinggi PKS meminta kader untuk meningkatkan kewaspadaan di tubuh internal partai dan melakukan evaluasi secara menyeluruh antar kader maupun petinggi partai. Dirinya juga

⁵³ *Republika*, *Tantangan PKS*, edisi 1 Februari 2013.

mengingatkan pentingnya kehati-hatian para kader agar tidak mudah terjebak atau terjerumus dalam permainan politik menjelang Pemilu 2014.⁵⁴ Selain itu, salah satu narasumber di *Republika* edisi 1 Februari 2013 berjudul “**Tantangan PKS**” juga mengharapkan agar masyarakat tidak menghakimi PKS terlalu keras terkait kasus sapi yang masih dalam tahap persidangan.

Meski *Republika* cukup banyak menonjolkan dukungan terhadap PKS, namun tidak dapat dihindarkan bahwa kasus sapi tentu akan berdampak pada runtuhnya kepercayaan publik terhadap PKS. Prediksi dampak tersebut ditanggapi salah seorang kader PKS yang mengatakan bahwa setidaknya butuh waktu sekitar 1 tahun untuk memperbaiki citra PKS. Masih dalam kaitannya dengan kepercayaan publik, beberapa pengamat politik juga sempat melontarkan kemungkinan hancurnya internal PKS akibat kasus sapi yang kemudian ditanggapi dengan analisis seorang peneliti sebuah LSM dalam pemberitaan *Republika* berikut ini:

Meskipun begitu, Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti memprediksi tidak akan timbul perpecahan dalam internal PKS. PKS adalah partai modern yang memiliki organisasi baik dengan administrasi yang baik pula. (*Republika*, 1 Februari 2013 paragraf 6).

Masih dalam kaitannya dengan prediksi kehancuran internal, para pengurus dan kader PKS pusat menyatakan bahwa sejauh ini belum ada kader yang kedapatan secara terbuka mengundurkan diri atau meninggalkan jabatannya akibat kasus ini.⁵⁵ Mungkin memang bila tingkat elektabilitas

⁵⁴ *Republika, Momentum Berbenah Diri*, edisi 2 Februari 2013.

⁵⁵ *Republika, Gerus Simpatisan*, edisi 4 Februari 2013.

terhadap PKS benar-benar turun, maka yang dipastikan akan pergi adalah voters, bukan kader. Perbedaan karakter antar partai politik khususnya parpol Islam, diyakini menjadi salah satu faktor yang cukup kuat untuk menahan kepindahan para kader maupun simpatisan ke partai politik lain, seperti yang disampaikan salah satu peneliti dari lembaga survey berikut ini:

Migrasi, disebut Qodari, hanya akan terjadi pada level pemilih. Meskipun begitu, jumlahnya juga tak akan terlalu signifikan. Menurutnya, kader dan simpatisan PKS mempunyai karakter politik yang berbeda dari pendukung partai lain. (Republika, 4 Februari 2013 paragraf 4).

Berbagai pemberitaan di atas menunjukkan bahwa *Republika* cukup banyak menonjolkan sikap optimis internal PKS yang tetap memberikan dukungan dalam menyikapi dampak-dampak yang diprediksi akan muncul akibat kasus sapi. Besarnya keyakinan para kader menunjukkan kekuatan dan kepercayaan mereka terhadap struktur dan pimpinan pusat maupun berbagai kebijakan yang diambil oleh para petingginya. Pilihan berita-berita *Republika* tersebut juga menyiratkan bahwa internal partai tetap kokoh dan siap untuk bahu-membahu dalam menghadapi isu turun suara dan tercorengnya citra partai. Hal ini penting bagi PKS untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Misalnya pada pemberitaan *Republika* edisi 1 Februari 2013 berjudul “**PKS di Posisi Sulit**” yang menampilkan perwakilan kader dari daerah seperti Jawa dan Lampung. Para kader meyakini bahwa PKS pasti bisa mengatasi ujian ini, dan mereka juga memastikan dukungan akan terus mengalir agar PKS mampu menempati posisi tiga besar pada Pemilu 2014.

Salah satu kader meyakini bahwa kasus sapi justru efektif dijadikan sebagai

filter untuk menguji loyalitas kader dan struktur PKS agar semakin solid ke depannya. Sama seperti yang disampaikan Hidayat Nur Wahid berikut ini:

Ketua fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, ada hikmah dari kasus ini. Ia menilai, kader merasa ada penzaliman terhadap PKS, kemudian PKS menjadi lebih solid dan terkonsolidasi. (Republika, 1 Februari 2013, paragraf 15).

Di balik keoptimisan dan kekokohan internal, sempat terselip sebuah tuduhan adanya konspirasi politik yang ingin menghancurkan PKS lewat kasus sapi yang muncul menjelang perhelatan Pemilu 2014. Salah satu kader PKS meyakini konspirasi politik benar-benar terjadi karena ada beberapa pihak yang tidak menyukai sikap kritis PKS terkait berbagai kebijakan pemerintah.⁵⁶ *Republika* hanya sekilas menanggapi isu tersebut lewat pernyataan Abdullah Dahlan dari *Indonesian Corruption Watch*, yaitu di edisi 3 Februari 2013 yang berjudul “Luthfi Mengaku Tak Tahu”. Bagi Abdullah, kecenderungan pelaku korupsi untuk mengaitkan kasusnya pada kemungkinan-kemungkinan lain ketimbang fokus pada penyelesaian kasusnya adalah hal yang umum dan wajar di dunia hukum dan politik.

Dari berbagai pemberitaan di atas, cukup terlihat bahwa *Republika* berusaha mengkonstruksi PKS sebagai partai politik berideologi serta berbasis massa Islam yang cenderung bersih dari korupsi. Bagi *Republika*, khalayak tidak bisa menjadikan kasus sapi sebagai alasan untuk memposisikan PKS sejajar dengan parpol lain yang sering terbukti melakukan korupsi. Dampak dari terungkapnya kasus sapi tidak dinilai cukup menghancurkan citra PKS

⁵⁶ *Republika*, *Kader PKS Usulkan Keluar Setgab*, edisi 2 Februari 2013

bila dibandingkan dengan dukungan dan segala bentuk pembelaan yang terus mengalir.

Tabel 5

Judul Berita, Isi Berita, dan Sumber Pemberitaan Konstruksi PKS Pada Kasus Suap Impor Daging Sapi di Republika

Judul Berita	Isi Berita	Sumber Berita
<p>PKS di Posisi Sulit</p>	<p>Perkiraan mengenai dampak yang akan muncul terhadap kasus suap yang melibatkan mantan presiden PKS.</p> <p>Pengamat politik meyakini akan ada penurunan suara untuk PKS di Pemilu 2014, sedangkan LSM dan kader PKS tetap menyuarakan keoptimisan terhadap PKS.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ari Dwipayana (Pengamat politik dari UGM) 2. Gun Gun Heryanto (Pengamat politik dari UIN Jakarta) 3. Iberamsjah (Guru Besar UI) 4. Ray Rangkuti (Direktur Linkar Madani Indonesia) 5. Sukamta (DPW PKS Yogya) 6. Gufron Aziz Fuadi (DPW PKS Lampung) 7. Hidayat Nur Wahid (Ketua Fraksi di DPR)
<p>Tantangan PKS</p>	<p>Narasumber menilai, bahwa kasus yang menimpa PKS merupakan semacam kombinasi uji coba di waktu yang tepat, untuk melihat</p>	<p>Rakhmat Hidayat (Dosen Sosiologi UNJ)</p>

	sejauhmana PKS mampu mempertanggungjawabkan jargon bersih dan peduli yang mereka usung.	
Momentum Berbenah Diri	Tanggapan Anis Matta terhadap kasus sapi adalah bahwa PKS sedang menjadi korban konspirasi politik. Di lain pihak, kasus ini akan dijadikan momentum agar PKS berbenah diri dan bekerja keras lagi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anis Matta (Presiden PKS) 2. Hidayat Nur Wahid (Ketua Fraksi di DPR) 3. Johan Budi (Jubir KPK)
Kader PKS Usulkan Keluar Setgab	<p>Usulan sejumlah kader PKS untuk keluar dari pemerintahan dan sikap kritis yang diajukan kepada KPK.</p> <p>Tanggapan para peneliti, yaitu Grace Natalie dan Dian Permata, bahwa kasus sapi ini merusak citra PKS dan akan membuat pemilih maupun masyarakat umum tidak percaya lagi dengan partai berlabel agama.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anis Matta (Presiden PKS) 2. Mahfudz Siddiq (Ketua Komisi 1 DPR fraksi PKS) 3. Grace Natalie (peneliti Saiful Mujani Institute) 4. Dian Permata (Founding Father House)
Luthfi Mengaku Tak Tahu	Kader PKS mengkhawatirkan adanya kepentingan pihak tertentu yang menunggangi KPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zainuddin Paru (Kuasa Hukum LHI) 2. Sohibul Iman (Ketua

	<p>dalam kasus sapi.</p> <p>Pengamat politik beranggapan bahwa kasus sapi menjadi besar karena ekspektasi masyarakat terhadap partai Islam khususnya PKS, sangatlah tinggi.</p>	<p>DPP PKS)</p> <p>3. Abdullah Dahlan (Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch)</p> <p>4. Burhanuddin Muhtadi (Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah & peneliti Lembaga Survey Indonesia)</p>
<p>Parpol Islam Mesti Berbenah</p>	<p>Harus ada yang dibenahi dari citra partai politik berbasis massa Islam. Ke depannya, parpol berbasis massa Islam diharapkan tidak hanya menjadikan agama sebagai sebuah simbol, namun juga sebagai sumber moral.</p>	<p>1. Siti Zuhro (Peneliti LIPI)</p> <p>2. Dian Permata (Peneliti Founding Father House)</p> <p>3. Gunawan Budiarto (Dirketur Program Pasca Sarjana UMY)</p> <p>4. Marwan Ja'far (Ketua Fraksi PKB)</p> <p>5. Ahmad Yani (Politisi PPP)</p>
<p>Gerus Simpatisan</p>	<p>Kasus sapi akan mempunyai dampak pada loyalitas kader partai.</p>	<p>1. Mohammad Qodari (Peneliti Indo Barometer)</p> <p>2. Toto Izul Fatah</p>

		(Peneliti Lingkar Survey Indonesia) 3. Bambang Cipto (Guru Besar UMY)
Konvensi Parpol Islam Mendesak	Konvensi antar parpol berbasis massa Islam dirasa perlu dilakukan untuk mengembalikan citra dan keterpilihan yang terpuruk belakangan. Serta ada pula harapan untuk mengulang sejarah kejayaan partai Islam seperti saat Masyumi dulu.	1. Edi Lukman (Ketua Fraksi PKB) 2. Viva Yoga Muladi (Ketua Badan Pemenangan Pemilu PAN) 3. Zulkieflimansyah (Ketua DPP PKS) 4. M. Romahurmuziy (Sekretaris Jenderal PPP)
Geopolitik PKS	Keberhasilan program penjarangan kader muda oleh PKS.	Ibnu Budiman (Anggota Forum Indonesia Muda)
Prospek Partai Islam	Ada banyak faktor lain yang menyebabkan penurunan tingkat elektabilitas parpol berbasis massa Islam sebelum kasus sapi mencuat.	Aziz Anwar Fachrudin (Analisis politik Islam; Pengajar pada Ponpes Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta)
Partai Islam dalam Survey	Diperlukan sikap kritis dalam melihat hasil survey dari beberapa lembaga, yang menyatakan parpol	Ahmad Yani (Wakil Ketua Fraksi PPP DPR RI)

	berasas dan berbasis Islam akan mengalami penurunan suara.	
PKS Nilai KPK Istimewakan Demokrat	Kader PKS merasa ada perbedaan sikap oleh KPK dalam mengusut kasus sapi dan kasus korupsi lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Almuzzamil Yusuf (Ketua DPP PKS) 2. Hidayat Nur Wahid (Ketua fraksi PKS) 3. Johan Budi (Juru Bicara KPK) 4. Ronald Worotikan (Jaksa Penuntut Umum)

Sumber: Pilihan koran *Republika* rentang edisi 31 Januari 2013 – 31 Mei 2013, diolah kembali oleh peneliti.

Tabel 6

Grafis Pendukung dalam Pemberitaan Konstruksi PKS Pada Kasus Suap Impor Daging Sapi di Republika

Tanggal	Judul Berita	Grafis Pendukung
1 Februari 2013	PKS di Posisi Sulit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grafis kejadian-kejadian yang sebelumnya sempat menggerus citra PKS 2. Komentar dari kader-kader PKS terhadap kasus suap sapi yang menimpa mantan presiden LHI

		3. Grafis perolehan suara PKS sejak mengikuti Pemilu (1999-2009)
	Tantangan PKS	-
2 Februari 2013	Momentum Berbenah Diri	-
	Kader PKS Usulkan Keluar Setgab	Foto gedung DPP PKS di Jakarta
3 Februari 2013	Luthfi Mengaku Tak Tahu	-
4 Februari 2013	Parpol Islam Mesti Berbenah	Perolehan suara partai politik berbasis Islam sejak Pemilu pertama digelar (1955-2009)
	Gerus Simpatisan	-
11 Februari 2013	Konvensi Parpol Islam Mendesak	-
20 Februari 2013	Geopolitik PKS	-
27 Februari 2013	Prospek Partai Islam	-
30 Maret 2013	Partai Islam dalam Survey	-
16 Mei 2013	PKS Nilai KPK Istimewakan Demokrat	Foto penyitaan mobil yang diduga terkait kasus korupsi suap sapi oleh KPK di DPP PKS Jakarta

Sumber: Pilihan koran *Republika* rentang edisi 31 Januari 2013 – 31 Mei 2013, diolah kembali oleh peneliti.

Pemilihan narasumber dari beberapa latar belakang yang berbeda berhubungan langsung dengan konstruksi yang dilakukan oleh *Republika*, yaitu untuk memperlihatkan bahwa PKS memiliki berbagai sumber dukungan

Porsi narasumber dari pihak internal sendiri cukup mendominasi pemberitaan yang dipilih sebagai sumber penelitian, yaitu sebanyak 12 kali dari total 32 narasumber. Selain itu, *Republika* juga memandang kasus sapi sebagai salah satu persoalan mendasar yang ada di dunia politik Indonesia, terbukti dari upaya *Republika* menaruh pemberitaan lebih banyak di rubrik Nasional yaitu 6 kali dari total 12 berita.

Karakteristik narasumber sendiri dapat dibagi ke dalam 3 bagian besar yaitu dari segi politik, hukum, dan agama. Segi politik mendapatkan porsi paling besar, yaitu sekitar 86,5 persen dari total keseluruhan. Suara politik ini diwakili oleh berbagai lembaga survey yang ada di Indonesia; pengamat politik dari berbagai pengajar di perguruan tinggi Islam maupun Negeri; forum kepemudaan; LSM, tokoh-tokoh partai politik di DPR maupun MPR; dan internal PKS sendiri. Sedangkan sisi hukum diwakili oleh lembaga hukum seperti KPK dan *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Terakhir, narasumber dari sudut pandang agama diwakili oleh seorang tokoh agama yang merupakan pengajar di sebuah pondok pesantren.

Pemilihan narasumber ini dilakukan untuk menguatkan persepsi dan membangun konstruksi terhadap PKS. Misalnya pada segi dukungan terhadap PKS, *Republika* memilih untuk menonjolkan internal partai dan analisis dari berbagai ahli yang rata-rata mengeluarkan tanggapan positif maupun sikap optimis. Sedangkan untuk menguatkan persepsi masyarakat terhadap *Republika* sebagai media massa yang kredibel dapat dilihat dari pemilihan

akademisi, maupun pengamat politik. Pasalnya, persentase angka-angka yang berasal dari perhitungan sistematis maupun penjabaran analisis yang ilmiah seakan mengukuhkan dan mendukung realitas yang disajikan ke tengah masyarakat, hingga tanpa sadar terbentuklah realitas media yang diinginkan.

b. *Causal Interpretation*

Dari berbagai pemberitaan yang menjadi objek penelitian, dapat disimpulkan bahwa *Republika* memosisikan kasus sapi sebagai aktor atau penyebab masalah yang menjatuhkan kredibilitas PKS. Sedangkan PKS sendiri dilihat sebagai korban politik dari kepentingan maupun pihak tertentu menjelang Pemilu 2014. Konstruksi ini diperkuat dengan fakta bahwa *Republika* cukup sering menonjolkan tersangka kasus ini yang tak lain adalah mantan Presiden PKS sendiri sekaligus ketua umum parpol pertama yang dipenjara KPK, salah satunya seperti kutipan berita berikut ini:

“Berat sekali. Yang terkena tuduhan korupsi nakhoda partai,” kata Iberamsjah. Iberamsjah mengatakan, selama ini PKS membangun citra partai dengan moralitas dan akhlak. PKS menempatkan diri sebagai partai santun yang antikorupsi. Namun, apa yang dibangun PKS menjadi rusak dengan penetapan tersangka Luthfi. (*Republika*, 1 Februari 2013, paragraf 4).

Kepercayaan publik terhadap PKS tergerus karena mereka tidak menyangka bahwa Luthfi akan melakukan korupsi. Tidak hanya dari sisi internal, kalangan eksternal pun banyak yang tidak percaya dengan penangkapan Luthfi tersebut. Selama menjabat, para simpatisan mengakui Luthfi sebagai sosok pemimpin yang alim dan bertanggung jawab dan peduli

terhadap kader-kadernya. Bagaimanapun, seorang pemimpin seharusnya mampu menjadi sosok teladan bagi bawahannya ataupun para pendukung partai. Ketika kualitas pemimpin terpuruk lewat kasus korupsi, maka bukan tidak mungkin masyarakat akan memberi penilaian yang sama untuk para pengurus dan kader lainnya. Pelabelan tertentu akan selalu muncul meski partai sudah berusaha melepaskan diri dari kasus tersebut.

Seorang Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Indonesia menegaskan bahwa jabatan Luthfi tersebut menjadi salah satu faktor pendorong yang mengakibatkan hilangnya dukungan terhadap PKS. Apalagi yang dipimpin adalah sebuah partai besar yang dari awal terkenal sebagai partai dakwah Islam. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak akan begitu saja melepaskan keterkaitan antara kader yang korupsi dengan partai yang memayunginya. Apalagi, kemungkinan adanya kader PKS lain yang ikut terlibat dalam kasus ini tentu akan semakin memperburuk citra PKS. Seperti yang dipaparkan beberapa pengamat politik dalam pemberitaan *Republika* edisi 3 Februari 2013 berikut ini, "*Yang dikhawatirkan ada efek domino dari kasus Luthfi dan memunculkan nama kader lain. Kalau itu terjadi, bisa jadi tsunami politik bagi PKS,*" jelasnya.

Sebenarnya bukan kali ini saja partai berlabel Islam tersandung kasus korupsi. Namun, kasus sapi yang menyeret sejumlah tokoh elite PKS ini cukup menyedot perhatian masyarakat. Menukil tanggapan seorang pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah sekaligus peneliti di Lembaga Survey Indonesia bahwa kasus sapi menjadi perhatian besar karena tingginya

ekspektasi masyarakat terhadap partai Islam yang mengusung simbol-simbol keagamaan. Maka ketika parpol Islam diketahui melakukan korupsi, terlebih lagi yang melakukan adalah petinginya, maka persepsi yang terbangun adalah bahwa para kader tidak menjadikan agama sebagai patokan dan sumber moral, melainkan hanya sebagai simbolis semata. Seperti yang disampaikan salah seorang narasumber di *Republika* edisi 4 Februari 2013 berjudul “Parpol Islam Mesti Berbenah” berikut ini, “*Direktur Program Pascasarjana UMY Gunawan Budianto menyarankan, partai-partai Islam mestinya tak menjadikan agama sebagai simbol semata.*”

Bahkan ada *stereotype* tertentu dari narasumber yang menegaskan bahwa bila partai Islam yang terlibat korupsi maka masyarakat akan menghakimi secara kejam, sedangkan bila yang terkena kasus korupsi berasal dari partai nasionalis atau sosialis maka masyarakat akan memakluminya.⁵⁷ Lebih jauh, masyarakat akan mengeneralisir bahwa seluruh kader PKS sudah tidak mencerminkan perilaku seorang Muslim, melainkan sebagai para politisi yang haus akan kekuasaan. Persepsi ini semakin diperparah dengan kenyataan parpol Islam saat ini yang memang sedang mengalami kekosongan tokoh politisi yang santun, bersih, dan jauh dari gemerlap kehidupan dunia.

Anggapan tersebut semakin mengukuhkan bahwa citra parpol Islam harus bersih dari perbuatan buruk seperti korupsi. Dengan kata lain, keterlibatan partai Islam dalam kasus korupsi adalah satu hal yang seakan tidak bisa dimaafkan oleh masyarakat. Simbolisasi agama seperti ka'bah,

aqidah Islam, dan *amar ma'ruf nahi mungkar* yang dijadikan pegangan para kader harus benar-benar dijaga dan ditampilkan dalam perilaku sehari-hari. Hal inilah yang dilihat *Republika* sebagai tantangan bagi PKS di tengah budaya korupsi yang sepertinya sudah menjangkiti seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, tidak peduli dengan latar belakang kehidupan maupun kepercayaan agamanya.

Kasus sapi ini kemudian diprediksi akan berdampak langsung pada menurunnya tingkat elektabilitas untuk PKS menjelang Pemilu 2014. Pengamat politik dan peneliti lembaga survey juga memprediksi tipisnya harapan PKS untuk menjadi partai tiga besar, persis seperti yang disampaikan seorang pengamat politik berikut ini, "*Kemungkinan peluang PKS untuk menjadi partai tiga besar dalam Pemilu 2014, kata Ari, akan semakin menipis.*"⁵⁸ Alasan dasar yang memicu prediksi ini adalah karena publik akan menghubungkan kader yang korupsi dengan partai yang bersangkutan. Keterkaitan Luthfi dalam kasus korupsi akan membuat para pemilih yang notabene adalah Muslim terdidik merasa kecewa dan meninggalkan PKS.

Kedua isu tersebut tentunya perlu dikelola dan diwaspadai, mengingat partai politik saat ini harus mempersiapkan diri sebaik mungkin demi menyambut Pemilu 2014. Menurut salah seorang peneliti dari lembaga survey Indo Barometer, penurunan suara diprediksi mencapai sekitar 50 persen dari total keseluruhan pendukung PKS di Pemilu 2014.⁵⁹ Hilangnya suara tersebut

⁵⁸ *Republika, PKS di Posisi Sulit*, edisi 1 Februari 2013.

⁵⁹ *Republika, Campa Simpatikan*, edisi 4 Februari 2013.

berasal dari *float masses* atau pemilih mengambang seperti para simpatisan yang sangat mudah terpengaruh isu. Bila merunut pada akar sejarah, pemilih PKS lebih mirip dengan karakteristik pemilih Masyumi yang modernis dan loyal, sehingga kemungkinan pemilih yang keluar dari PKS diprediksi akan pindah ke PPP atau PAN.⁶⁰

Kekecewaan publik tidak hanya berdampak pada merosotnya dukungan dan turunnya suara bagi PKS, namun juga merambat terhadap surutnya kepercayaan masyarakat terhadap partai yang dilabeli memiliki ideologi atau berbasis massa Islam lainnya. Ini terlihat dari berbagai hasil survey mengenai suara untuk parpol Islam yang hampir semuanya meraih hasil kurang dari lima persen. Para peneliti dari lembaga survey meyakini bahwa citra parpol Islam seperti PPP, PKB, dan PAN yang juga lekat dengan simbol-simbol keagamaan ikut tercoreng akibat kasus sapi PKS.

Peneliti LIPI Siti Zuhro mengatakan, parpol Islam akan mendapat tantangan elektoral yang lebih berat setelah PKS tersandung kasus dugaan korupsi impor daging sapi. "Mereka harus kerja keras," ungkapnya saat dihubungi *Republika*, Ahad (3/2). (*Republika*, 4 Februari 2013, paragraf 2).

Republika memutuskan untuk menjadikan kasus sapi sebagai aktor utama dalam konstruksi PKS kali ini. Penetapan Luthfi sebagai tersangka menimbulkan banyak dampak negatif yang merugikan PKS. Apalagi hal ini terjadi di tengah-tengah kondisi masyarakat yang sudah seringkali diabaikan kebutuhan hidupnya. Minimnya rasa percaya mereka terhadap wakil rakyat, semakin tergerus dengan adanya satu lagi kasus korupsi yang menambah

⁶⁰ *Republika*, Kader PKS Uraikan Keluar Satgah, edisi 2 Februari 2013

daftar panjang rapor buruk perpolitikan di Indo lebih teliti, *Republika* tidak mengangkat dampak masyarakat luas, namun lebih kepada faktor kasus sapi berpengaruh langsung terhadap citra p

c. *Moral Evaluation*

Elemen *framing* Entman berikutnya yang ditonjolkan dalam pemberitaan dan membenarkan argumen dua elemen sebelum ditampilkan pemberitaan merupakan salah satu *Republika* untuk menunjukkan dukungan terhadap disajikan dalam berbagai analisis seperti; b menyebabkan turunnya elektabilitas parpol Islam serta sikap KPK yang dipandang tidak adil dalam

Klaim moral dominan ditampilkan dalam rubrik Opini, dimana narasumber langsung pribadinya melalui analisis berbobot dan penja kasus sapi. Pilihan moral pertama yang mengenai dukungan dari kader muda PKS yang sapi terungkap. Para kader muda ini tidak s Pilihan tersebut bisa jadi disebabkan ka kepercayaan dan harapan terhadap kinerja

Dukungan para kader ini juga dipandang sebagai salah satu kekuatan PKS karena merupakan program yang dianggap paling sukses di antara parpol lain di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dalam sebuah opini berjudul “Geopolitik PKS”, yang ditulis oleh sosok bernama Ibnu Budiman yang aktif dalam mengawasi dan mewadahi pergerakan kepemudaan Indonesia dalam sebuah lembaga yang bernama Forum Indonesia Muda. Dari sudut pandang anak muda, Ibnu menilai dukungan yang terus mengalir saat kasus sapi mencuat itu merupakan keberhasilan dari sistem kaderisasi PKS terhadap kader-kader muda yang umumnya masih berstatus pelajar dan mahasiswa.

Analisis tersebut dibuktikan dengan munculnya berbagai pembelaan dan dukungan yang disampaikan oleh para kader muda lewat pernyataan, poster, atau artikel yang disebarluaskan lewat akun media sosial masing-masing. Ada juga grup *facebook* yang khusus ditujukan untuk pembelaan terhadap PKS, atau dukungan terhadap Anis Matta sebagai Presiden PKS yang baru dengan memasang fotonya di akun media sosial. Media massa partisan seperti PKSpiyungan.org atau Dakwatuna.com juga menjadi bagian penting dalam keberhasilan yang disebut Ibnu, pasalnya mereka cenderung memberitakan pembelaan dan berita-berita positif mengenai PKS.⁶¹

Keberhasilan program kaderisasi ini didorong beberapa faktor, salah satunya adalah kejelasan target PKS yaitu daerah-daerah yang memiliki perguruan tinggi dengan kualitas relatif baik di Indonesia. Faktor lain adalah pola rekrutmen yang dilakukan secara berjenjang (*tarbiyah*), dimana

⁶¹ Republika, *Geopolitik PKS*, edisi 20 Februari 2013.

pemahaman berdasarkan ideologi PKS diberikan kepada kader secara berkala dan teratur. Tujuannya agar militansi para kader muda menjadi sangat kuat, baik secara pemahaman agama maupun politik. Sistem kaderisasi PKS ini cukup menunjukkan hasilnya ketika terjadi lonjakan suara yang cukup signifikan dalam Pemilu 2004. Oleh karena itu, walaupun mantan presidennya sedang tersangkut kasus suap, Ibnu menilai para kader muda ini akan tetap setia terhadap partai seperti pernyataannya berikut ini:

Kasus LHI yang menghancurkan citra PKS saat ini di mata publik secara umum, tidak berpengaruh terlalu besar terhadap kesetiaan para kader muda. Sistem kaderisasi doktrin melalui sistem kelompok-kelompok sel di PKS membuat militansi mereka menjadi sangat kuat. (Republika, 20 Februari 2013, paragraf 16).

Selain keberhasilan program PKS yang ditonjolkan pemberitaan *Republika*, ada juga artikel yang berisi tentang analisis dari pakar Politik Islam yang menjabarkan berbagai pemicu turunnya suara partai Islam yang sebenarnya telah terjadi sejak lama. Analisisnya yang diturunkan pada edisi 27 Februari 2013 berjudul "**Prospek Partai Islam**" ini seakan menegaskan klaim bahwa kasus sapi bukanlah faktor utama turunnya elektabilitas masyarakat terhadap partai Islam secara keseluruhan, seperti yang telah diprediksi pengamat politik dan lembaga survey sebelumnya.

Faktor pendorong pertama adalah karena telah terjadinya perenggangan politik. Artinya, loyalitas massa masing-masing parpol berkurang bahkan hilang karena disebabkan oleh kesalahan parpol sendiri yang dinilai tidak banyak memberikan kinerja dan prestasi yang dapat

menciptakan perhatian positif dari publik. Faktor kedua adalah

menegaskan bahwa tujuan analisisnya bukan untuk mempertanyakan integritas penyelenggara survei, tapi agar hasil survei tetap terjaga kredibilitas ilmiahnya. Oleh karena itu, tentu diperlukan ketelitian dalam menentukan sampel agar hasilnya merepresentasikan realitas sesungguhnya.

Analisisnya ini berdasarkan pengalaman PPP sendiri yang pernah mengalami perbedaan antara hasil survey dan hasil Pemilu di lapangan. Umumnya, hasil di lapangan menunjukkan perolehan suara yang lebih besar ketimbang hasil dari lembaga survey yang ditunjukkan oleh awak media dalam pemberitaannya. Bahkan, perbedaan hasil suara untuk PPP itu terjadi hingga tiga kali Pemilu, yaitu tahun 1999, 2004, dan 2009. Berikut tanggapan Ahmad mengenai hal tersebut:

Keadaan ini tentu kurang baik untuk dibiarkan. Melesetnya survey politik di Indonesia tampaknya karena ukuran sampel terlalu kecil, atau metode penarikan contoh yang tidak mempertimbangkan keragaman latar belakang pemilih. Bila ukuran sampel hanya seribu orang maka itu terbukti gagal mempresentasikan 171 juta orang. (Republika, 30 Maret 2013, paragraf 9).

Klaim terakhir disajikan *Republika* dalam bentuk pemberitaan yang berasal dari wawancara beberapa narasumber, antara lain di *Republika* edisi 3 Februari 2013 berjudul "Luthfi Mengaku Tak Tahu", dan edisi 16 Mei 2013 berjudul "PKS Nilai KPK Istimewakan Demokrat". Kedua pemberitaan ini menghadirkan wacana yang sama, yaitu bahwa KPK sebagai lembaga hukum anti-korupsi, dinilai sudah bersikap tidak adil oleh internal PKS dalam prosesnya mengurus kasus sapi. Para kader ini merasa didzalimi oleh sikap

KPK yang memperlakukan PKS secara berbeda dengan partai lain, meski

petingginya sama-sama terseret kasus korupsi. Salah satu kekecewaan kader tertuang dalam pembukaan paragraf pemberitaan berikut:

Sebaliknya, dalam kasus yang menjerat eks ketua umum PKS Luthfi Hasan Ishaq (LHI), lembaga antirasuah justru menerapkan UU TPPU. "Kami merasa tidak diperlakukan sama di mata hukum. Kami merasa berbeda," kata Ketua DPP PKS Almuzzammil Yusuf, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/5). (Republika, 16 Mei 2013, paragraf 2).

Para kader memang sudah menyerahkan kasus sapi kepada pihak yang berwenang, namun ada sedikit kekhawatiran yang muncul terhadap KPK, mengingat ada ketidakwajaran dalam proses penangkapan dan penetapan Luthfi sebagai tersangka. Kritik terhadap kredibilitas KPK pun datang dari pihak eksternal maupun internal PKS, seakan-akan *Republika* memang ingin menonjolkan adanya pertarungan politik tidak sehat pada kasus ini, seperti yang menjadi pemahaman seorang kader PKS yang menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR berikut ini:

Mahfudz mengakui, sejak beberapa bulan lalu, PKS telah menerima informasi bahwa beberapa pimpinan dan pejabat publiknya menjadi target operasi. Operasi itu dinilainya sebagai bagian dari pertarungan politik yang kasar. "Ini kami pahami sebagai bagian dari pertarungan politik tidak sehat," lanjut Mahfudz. (Republika, 2 Februari 2013, paragraf 8).

Salah satu kader yang menyuarakan pendapatnya adalah Sohibul Iman yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR fraksi PKS saat ini. Secara pribadi dirinya berharap agar KPK bersikap seimbang dan tidak ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Berdasarkan pengamatannya, KPK adalah

memungkinkan kurang ketatnya kontrol pimpinan KPK terhadap masing-masing penyidik di lapangan. Seperti dalam pernyataannya berikut ini:

Tidak semua pimpinan KPK, menurut dia, memiliki kontrol penuh terhadap penyidik di lapangan. Dengan demikian, dalam konteks sosial politik bisa saja terjadi penyusupan oleh pihak-pihak tertentu. (Republika, 3 Februari 2013, paragraf 8).

Kader lainnya yang juga memiliki pendapat yang sama adalah Almuzzammil Yusuf yang saat ini menjabat sebagai ketua DPP PKS. Menurutnya, selain proses penangkapan tersangka, pilihan undang-undang yang digunakan dalam persidangan kedua kasus tersebut juga membuat PKS merasa diperlakukan tidak adil oleh KPK. Padahal sebagai lembaga hukum resmi, sudah sepatutnya KPK memperlakukan mereka secara sama, persis seperti yang dilontarkan.

d. *Treatment Recommendation*

Bagi *Republika*, kasus sapi tidak serta merta dijadikan senjata untuk menyerang atau menjatuhkan PKS, melainkan dijadikan pelajaran berharga untuk menghadapi Pemilu 2014. *Republika* memang tidak secara langsung menyatakan dukungannya terhadap PKS, namun isi pemberitaan suap sapi mayoritas menyuarakan bahwa PKS layak mendapat kesempatan kedua dengan cara menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan menguatkan konsolidasi atau hubungan antar kader.

Lewat elemen terakhir dari Entman, *Republika* menawarkan

rekomendasi penyelesaian agar mampu mengembalikan citranya. Keseluruhan

rangkaian rekomendasi ini menjawab *frame* yang dari awal telah dibentuk oleh *Republika*, yaitu bahwa kasus sapi hanya merupakan ujian terhadap kredibilitas PKS sebagai partai jujur bersih yang anti korupsi. Terlebih lagi, rekomendasi dan saran perbaikan ini tidak ditujukan untuk PKS saja, melainkan semua parpol berbasis Islam serta berbasis Muslim. Tujuannya agar kader parpol Islam tidak ada lagi yang terseret kasus korupsi dan citra parpol Islam kembali membaik.

Rekomendasi penyelesaian pertama adalah agar PKS melepaskan diri dari kasus sapi. Caranya dengan menjelaskan duduk persoalan kepada para kader di tingkat pusat hingga daerah, bahwa kasus sapi adalah kasus pribadi Luthfi Hasan Ishaq dan aliran dana korupsi kasus tersebut dipastikan tidak mengalir ke kas atau administrasi partai. Selain itu, Majelis Syuro PKS juga dihibau agar segera menggantikan posisi presiden partai dengan kader yang dianggap mampu mengemban tanggung jawab tersebut. Tidak ketinggalan, Luthfi juga disarankan untuk melakukan permintaan maaf kepada publik dan secara sukarela mengundurkan diri dari posisi presiden partai.⁶³

Rekomendasi penyelesaian kedua adalah PKS disarankan untuk melakukan introspeksi, evaluasi, dan pembenahan citra partai secara menyeluruh dengan tujuan meningkatkan kesolidan antar kader maupun simpatisan. Salah satu cara yang dianggap paling efektif adalah dengan kembali pada ideologi PKS sejak awal dibentuk, yaitu sebagai partai kader

⁶³ *Republika*, *PKS di Posisi Sulit*, edisi 1 Februari 2013.

yang mengajak masyarakat untuk kembali berpegang teguh pada ajaran agama Islam yang berdasar pada Al-Quran dan As-Sunnah.

Selanjutnya partai-partai Islam diminta untuk menjaga nama baik dengan lebih serius. Misalnya dengan meningkatkan pengawasan terhadap masing-masing divisi dan individu di internal serta mengembangkan rasa saling peduli terhadap perilaku kader maupun petinggi partai lainnya. Persis seperti yang disampaikan Hidayat Nur Wahid berikut ini, "*Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid meminta seluruh kader harus mengevaluasi pengawasan seluruh kader termasuk pengawasan perilaku pimpinan PKS. Dengan demikian, kader dan pimpinan PKS tidak mudah dijebak dan dijerumuskan.*"⁶⁴ Tujuan dari pesan Hidayat Nur Wahid tersebut adalah demi mencegah para kader melakukan sesuatu yang dapat menjatuhkan citra partai atau memperluas dampak kerusakan yang telah terjadi sebelumnya.

PKS serta partai Islam lainnya juga harus berusaha mengembalikan citra partai yang menampilkan perilaku Islam, antara lain dengan menghindari sikap hedonis dan tidak menonjolkan materi yang dimiliki. Simbol-simbol agama harus berhenti dipamerkan dan sekadar dijadikan tameng, sebaliknya para kader harus mampu menjiwai etika Islam dan menjadikannya sebagai patokan moral yang melandasi kehidupan sehari-hari. Serta yang tak kalah penting adalah menampilkan sosok politisi yang santun, bersih, dan jauh dari gemerlap kehidupan duniawi, tidak hanya sebagai pencitraan, tapi lewat aksi nyata di tengah masyarakat. Seperti yang disarankan oleh Gunawan Budianto,

⁶⁴ Republika, *Momentum Berubah Diri*, edisi 2 Februari 2013.

Direktur Program Pascasarjana UMY di berita berikut ini, "*Parpol Islam mesti menunjukkan bahwa mereka juga menjiwai etika Islam. Islam mesti benar-benar dijadikan patokan moral.*"⁶⁵

Langkah penyelesaian lain yang dapat digunakan untuk memperbaiki citra PKS dan partai Islam lainnya adalah dengan membenahi komunikasi politik ke masyarakat, yaitu komunikasi publik dan komunikasi strategis.⁶⁶ Komunikasi publik dapat dilakukan dengan turun membantu ke tengah-tengah masyarakat secara langsung. Penyebaran komunikasi lewat media massa juga perlu ditingkatkan dengan tujuan agar media dan publik dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai partai secara akurat dan jujur. Sedangkan komunikasi strategis diharapkan menjadi kunci hubungan antara partai Islam dan pihak-pihak eksternal seperti ormas Islam, pesantren, organisasi kepemudaan maupun kemahasiswaan. Rekomendasi penyelesaian ini didasarkan pada keyakinan bahwa komunikasi adalah hal penting dalam kesuksesan seni memimpin para pemimpin, seperti yang dijelaskan oleh seorang narasumber berikut ini:

Komunikasi yang baik akan menciptakan kepercayaan. Dalam politik, kepercayaan adalah mata uangnya. Logikanya, jika kepercayaan timbal balik antara partai Islam dan ormas juga umat Islam meningkat maka survey politik yang jujur akan dapat membacanya. (Republika, 30 Maret 2013, paragraf 14).

Langkah ketiga yang disarankan *Republika* untuk menyelamatkan PKS maupun partai Islam lainnya dari kasus sejenis adalah membenahi sistem

⁶⁵ *Republika, Parpol Islam Mesti Berbenah*, edisi 4 Februari 2013.

⁶⁶ *Republika, Partai Islam dalam Survei*, edisi 30 Maret 2013.

berembuk untuk membicarakan persatuan parpol Islam. Saran tersebut memang tidak mudah dilaksanakan, mengingat masing-masing parpol memiliki kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, parpol Islam terlebih dulu diharapkan untuk meninggalkan ego dan kebanggaan sebagai wakil aliran tertentu, apalagi sistem politik aliran kini dinilai sudah tidak laku lagi.

Salah seorang perwakilan dari Badan Pemenangan Pemilu (BAPILU) PAN terlihat cukup apresiatif dengan adanya saran ini. Dirinya menyarankan perlu ada kerjasama berlanjut antara parpol Islam. Bila belum ada kesempatan dalam memenangkan Pemilu 2014, setidaknya koordinasi antar parpol Islam terus berjalan untuk kembali menyiapkan amunisi di Pemilu periode selanjutnya. Seperti yang diungkapkan kader PAN tersebut dalam pemberitaan berikut ini:

Hal tersebut bisa dijadikan modal untuk menentukan siapa presiden yang akan diusung oleh partai Islam. "Jadi, nanti partai-partai Islam melakukan kajian secara mendalam tentang figur yang akan dimunculkan. Itu sangat bagus sekali sekaligus menjadi nilai tawar kita," katanya. (Republika, 11 Februari 2013, paragraf 11).

Berbagai dukungan yang ditunjukkan lewat elemen Entman sebelumnya akhirnya ditutup dengan rekomendasi penyelesaian oleh *Republika*. Tahapan langkah penyelesaian ini mengarah pada pemulihan citra partai, tujuannya agar dampak kasus sapi tidak semakin meluas dan PKS bisa fokus dalam persiapan menyambut Pemilu 2014. *Republika* menanamkan pemahaman terhadap khalayak sekaligus melakukan konstruksi terhadap PKS, bahwa sesungguhnya isu penurunan suara dan keruntuhan citra parpol Islam

dipusingkan dengan berbagai hasil survey yang belum tentu jelas kebenarannya dan harus mampu melewati ujian ini.

Tabel 7

***Frame* PKS dalam Kasus Suap Impor Daging Sapi di Republika**

<i>Frame</i>	Kasus sapi menguji komitmen dan kredibilitas PKS sebagai partai bersih yang anti-korupsi."
<i>Problem Identification</i>	Kasus sapi adalah persoalan internal yang membawa dampak negatif pada citra PKS dan partai Islam secara keseluruhan.
<i>Causal Interpretation</i>	Luthfi Hasan Ishaq dan kasus sapi adalah penyebab masalah yang menjatuhkan citra PKS.
<i>Moral Evaluation</i>	Dukungan terhadap PKS terus mengalir; Beragam faktor pemicu penyebab turunnya elektabilitas parpol Islam sebelum kasus sapi mencuat; Kritik terhadap hasil survey; Sikap KPK yang tidak adil dalam memproses kasus sapi.

<p><i>Treatment Recommendation</i></p>	<p>PKS dan partai Islam harus melakukan introspeksi dan evaluasi internal; Tonjolkan perilaku Islam; Membenahi sistem kepartaian; dan Melakukan konvensi antar parpol Islam.</p>
--	--

Sumber: Hasil olah data dan analisis penelitian dari koran *Republika* rentang edisi 31 Januari 2013 – 31 Mei 2013.

B. FRAME KOMPAS: Mencuatnya Kasus Sapi Membuat PKS Diasumsikan Sebagai Partai yang Sama Korupnya dengan Partai Lain.

Kompas tidak melihat kasus sapi hanya sebagai persoalan internal PKS saja, namun juga persoalan besar bangsa Indonesia. Sistem politik dan kepartaian dinilai sebagai salah satu faktor penyebab utama dalam konstruksi PKS ini. Pendidikan politik belum memadai dan hanya melahirkan pemahaman dan pengalaman SDM yang belum cukup kokoh dalam hal berpolitik. Institusi politik juga masih banyak yang dikendalikan oleh kekuatan bisnis atau ekonomi tertentu. Pada akhirnya semua hanya menyisakan tokoh-tokoh yang mementingkan kepuasan dan ambisi pribadinya yang tak jarang mengumbar berbagai janji dengan dalih ‘kepentingan rakyat’

... (dari wawancara) ... Dan hal ini tidak hanya mengenai

Di tengah kondisi politik yang seperti itu, pemerintah yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat juga dinilai tidak tegas dalam mengatur sistem politik dan sangat lemah dalam mengawasi institusi politik. Akibatnya loyalitas masyarakat semakin rendah terhadap negara dan sikap apatis pun semakin berkembang terhadap institusi politik. Semuanya memuluskan perilaku korupsi para wakil negara yang semakin merajelala di tingkat lokal maupun nasional.

Oleh karena itu, kasus sapi dilihat hanya sebagai salah satu imbas dari kondisi politik Indonesia yang sudah bobrok dan sangat tidak efektif, sehingga tidak mampu menghadang politisi dari godaan korupsi. Kesalahan tidak dilihat murni hanya karena PKS, namun juga karena beragam faktor pendorong yang memperparah kondisi seperti minimnya pendidikan politik, kesalahan nilai politik yang menyebar di Indonesia, hingga sosok pemimpin yang tidak bisa diteladani oleh rakyatnya. Terhitung ada 14 berita yang mendukung terbentuknya *framing Kompas* tersebut, yaitu:

Tabel 8

Tanggal, Judul dan Penempatan Pemberitaan Konstruksi PKS Pada Kasus Suap Impor Daging Sapi di *Kompas*

Tanggal Pemberitaan	Judul Berita	Penempatan Berita
2 Februari 2013	Perbaiki Sistem Politik Rusak	Rubrik Politik & Hukum, hal 2

3 Februari 2013	PKS Diminta Legawa dan Hormati Proses Hukum	<i>Headline</i> , hal 1
4 Februari 2013	Terbongkarnya Korupsi Itu Arisan	<i>Headline</i> , hal 1
7 Februari 2013	Korupsi Itu Bertentangan dengan Agama	Rubrik Politik& Hukum, hal 5
11 Februari 2013	Jajak Pendapat "Kompas": Kasus Korupsi Batu Sandungan Parpol	Rubrik Politik& Hukum, hal 5
15 Februari 2013	Masyarakat Kehilangan Model	Rubrik Politik& Hukum, hal 5
18 Februari 2013	Jajak Pendapat "Kompas": Pertaruhan dalam Tubuh KPK	Rubrik Politik& Hukum, hal 4
	KPK: Tenar di Tengah Keterbatasan	Rubrik Politik& Hukum, hal 4
20 Februari 2013	Demokrat-PKS Kian Terpuruk	Rubrik Politik& Hukum, hal 2
	Menimbang Partai Agama	Rubrik Opini, hal 6
9 Maret 2013	Bangsa Alami Disorientasi	<i>Headline</i> , hal 1
11 Maret 2013	Kebijakan Telah Lumpuh	Rubrik Politik& Hukum, halaman 4
22 Maret 2013	Pejabat Jujur Sulit Dicari	Rubrik Opini, halaman 6
18 Mei 2013	Arena Politik Ternak	Rubrik Opini, halaman 6

Sumber: Dilihat kembali Kompas rentang edisi 31 Januari 2013 - 31 Mei 2013

a. *Problem Identification*

Tim Litbang *Kompas* mewakili penilaian masyarakat Indonesia terhadap citra parpol lewat salah satu artikelnya yang berbunyi, "*Tiga tahun terakhir, partai politik menjadi lembaga paling kerap mendapat penilaian negatif dari publik*".⁶⁹ Kalimat pembuka tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa hingga saat ini kinerja partai politik dianggap belum mampu mewakili aspirasi rakyat, juga karena semakin sering terungkapnya kasus korupsi maupun moral yang melibatkan para politisi. Berbagai media massa memiliki andil besar dalam membentuk realitas politik tersebut, salah satunya dengan berlomba menyajikan proses pengusutan kasus yang seringnya berlarut-larut dan tumpang tindih dengan kasus-kasus baru.

Pada jajak pendapat edisi 11 Februari 2013, *Kompas* melansir sebuah data koruptor dari kalangan politisi yang sebelumnya sempat dirilis oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam pada akhir tahun 2012 lalu. Pada data tersebut dijelaskan bahwa setidaknya ada 176 pejabat politik yang melakukan tindak pidana korupsi pada periode 2004-2009 dan periode 2009-2013. Seandainya data tersebut benar, maka 64 orang pelaku korupsi tersebut berasal dari Partai Golkar, 32 orang dari PDI-P, 20 orang dari Demokrat, dan sisanya adalah gabungan dari beberapa partai lain.

Fenomena ini membuat masyarakat semakin jenuh terhadap dunia politik di Indonesia. Generalisasi tidak dapat dihindari dan akhirnya membentuk sebuah persepsi di tengah masyarakat, yaitu bahwa kemungkinan

besar hampir semua parpol telah benar-benar melakukan praktik korupsi. Seperti kutipan pernyataan tim Litbang *Kompas* berikut ini, “*Jika ditelisik lebih jauh, hampir semua parpol saat ini memiliki kader yang terbelit kasus korupsi.*”⁷⁰ Seorang tokoh politik bahkan berani meletakkan label bahwa perilaku korupsi telah menjadi watak atau kepribadian politik Indonesia saat ini.⁷¹ Labelisasi tersebut seakan menunjukkan bahwa perilaku korupsi begitu kuat melekat dan tak mudah dilepaskan dari citra para elite politik.

Melihat kondisi ini, publik tentu harus benar-benar menimbang partai yang maju ke Pemilu 2014. Kemungkinan meningkatnya golongan putih pun sepertinya tidak bisa dihindarkan. Apalagi kecenderungan politik aliran dan pemilih ideologis yang sempat marak di era 1980/1990-an kelihatannya juga sudah mulai tersapu oleh sikap pragmatis, dimana para pemilih tidak lagi terpatok pada partai yang itu-itu saja. Bila kondisi ini terus dibiarkan, maka dampak jangka panjangnya adalah sikap apatis masyarakat terhadap pemerintah maupun negara akan semakin meningkat dan membuat orang-orang baik enggan masuk partai, sehingga pada akhirnya bangsa hanya akan diwakili orang-orang yang memikirkan kepentingannya sendiri.

Sebagai media cetak terkemuka di Indonesia, *Kompas* juga menyoroti budaya korupsi ini. Bagi *Kompas*, alih-alih menjadi solusi berbagai persoalan yang melanda negeri ini, partai politik justru malah menjadi pelaku masalah yang dinilai gagal dalam melewati uji realitas (*reality check*) atas pencitraan

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ *Kompas, Terbongkarnya Korupsi Itu Arisan*, edisi 4 Februari 2013.

yang mereka buat sendiri. Jargon 'Bersih, Jujur, Anti-Korupsi' serta 'Katakan Tidak Pada-Korupsi' seakan hanya menjadi kumpulan kata yang tak ada maknanya. Begitu juga ketika kasus sapi PKS mencuat, *Kompas* pun ikut menurunkan berbagai pemberitaan yang mengaitkan antara kasus sapi, konstruksi PKS secara keseluruhan, serta kaitannya dengan permasalahan bangsa ini.

Bagi *Kompas*, seorang Presiden parpol yang selama ini dikenal sebagai partai yang relatif cukup bersih, seakan tiba-tiba terbukti hanya menggemborkan ideologi agama lewat ucapan dan simbol-simbol semata karena mencuatnya kasus sapi tersebut. Seperti kutipan pernyataan yang disampaikan oleh Ade Irawan, salah seorang narasumber yang berasal dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) berikut ini, "*Ini momentum introspeksi dan perubahan bagi PKS serta memperkuat komitmen melawan korupsi. Bukan hanya verbal saja sebagai partai yang mengusung agama, PKS seharusnya tahu bahwa suap dan korupsi adalah hal yang tidak benar,*" katanya.⁷²

Kompas kemudian mengkonstruksi PKS sebagai partai yang sama korupnya dengan partai lain. Terbukti dengan seringnya *Kompas* menyandingkan kasus sapi dengan kasus wisma atlet yang juga menyeret petinggi Partai Demokrat dalam pemberitaannya. Berbagai analisis maupun jajak pendapat terhadap persepsi masyarakat mengenai kasus kedua partai ini diturunkan secara bersamaan, lengkap dengan berbagai faktor pemicu dan

dampak yang menyebar luas lainnya, salah satunya adalah prediksi menurunnya tingkat elektabilitas kedua partai di Pemilu 2014. Menurut salah seorang peneliti lembaga survey di Indonesia, awalnya masyarakat sempat memiliki harapan kepada Partai Demokrat dan PKS sebagai partai yang relatif bersih dari korupsi, namun kenyataannya kader kedua partai ini juga terlibat kasus korupsi.⁷³

Kompas melakukan jajak pendapat untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap PKS dan Demokrat pada tanggal 6-8 Februari 2013. Hasilnya menunjukkan bahwa sikap publik terhadap PKS tidak sedramatis perkiraan lembaga-lembaga survey yang menyatakan bahwa akan banyak simpatisan PKS yang keluar akibat kasus sapi. Sekitar 80 persen lebih responden memang menyatakan kekecewaannya terhadap keterkaitan Luthfi, namun kekecewaan itu tidak berlanjut pada keputusan responden untuk meninggalkan partai. Lagipula elektabilitas PKS sebenarnya diyakini memang telah turun sebelum kasus sapi mencuat, seperti yang disampaikan oleh Tim Litbang *Kompas* berikut ini:

Meski paling “moncer” dibanding perolehan suara partai Islam lain, suara PKS kini diperkirakan bakal merosot. Hasil survey tatap muka *Kompas* pada Desember 2012 menunjukkan, elektabilitas PKS hanya 3,3 persen. Angka itu sebelum mencuatnya kasus Luthfi. (*Kompas*, 11 Februari 2012, paragraf 7).

Jajak pendapat *Kompas* menyebutkan hanya sekitar 10 persen responden yang dengan tegas menyatakan akan pindah ke partai lain. Sebagian besar lainnya memilih untuk ‘mengambil jarak’ alias pikir-pikir lagi

untuk tetap memilih PKS di Pemilu 2014. Alasan ini didasarkan pada PKS yang dinilai relatif bersih karena belum pernah terbukti bersalah di kasus korupsi sebelumnya. Alasan tersebut nilainya jauh lebih tinggi dibanding unsur program partai dan faktor sosok SBY yang digunakan responden sebagai alasan untuk tetap memilih Partai Demokrat.⁷⁴

Jajak pendapat tersebut juga menyimpulkan bahwa kepercayaan publik memang merosot drastis setelah kasus sapi mencuat. Terbukti sebanyak 66 persen responden tak lagi yakin bahwa PKS merupakan partai bersih, dan yang lebih parah PKS juga dipersepsikan publik sebagai partai terkorup kedua setelah Partai Demokrat.⁷⁵ Elektabilitas Partai Demokrat juga masih lebih tinggi ketimbang PKS. Namun jajak pendapat tersebut tidak bisa dijadikan patokan penilaian, karena pertarungan perebutan suara di arena Pemilu memang sama sekali tidak mudah, terbukti dari tipisnya perolehan suara PKS di Pemilu 2004 dan 2009 yang hanya berjarak sekitar 0,4 persen.

Kompas juga menyoroti sikap defensif berupa tuduhan adanya konspirasi politik yang ingin menghancurkan PKS lewat mencuatnya kasus sapi. Tuduhan tersebut dilontarkan oleh Anis Matta kepada KPK sebagai lembaga hukum yang berwenang dalam pengusutan kasus sapi. Banyak pihak menyangkan sikap defensif PKS yang dinilai berlebihan ini. Tuduhan konspirasi tersebut dinilai hanya akan menyudutkan PKS sekaligus menjadi bumerang bila tidak bisa dibuktikan kebenarannya.

⁷⁴ Kompas, *Jajak Pendapat "Kompas": Kasus Korupsi Batu Sandungan Parpol*, edisi 11 Februari 2013.

⁷⁵ Kompas, *Jajak Pendapat "Kompas": Kasus Korupsi Batu Sandungan Parpol*, edisi 20 Februari 2013.

Reaksi defensif sebenarnya merupakan reaksi yang wajar dilakukan oleh politisi atau parpol yang tertangkap melakukan korupsi. Namun masalahnya, PKS melontarkannya di tengah-tengah opini publik yang sudah sedemikian marah pada perilaku korupsi dan meminta terobosan penyelesaian terhadap proses pengusutan yang berlarut-larut. Tudingan itu juga dinilai tidak tepat bila ditujukan terhadap KPK yang memiliki kredibilitas sebagai lembaga yang mampu memberantas korupsi. Seperti yang disampaikan dalam analisis seorang jurnalis *Kompas* di pemberitaan berikut ini:

Namun, tampaknya publik percaya dengan KPK sebagai lembaga profesional dan kredibel. Siapa pun yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh komisi itu biasanya dapat dibuktikan kejahatannya di pengadilan. (*Kompas*, 7 Februari 2013, paragraf 5).

Sikap defensif ini diperkirakan muncul karena PKS tidak siap menghadapi sorotan publik dan mencari cara membela diri. *Kompas* justru berharap agar PKS tidak menyerang KPK atau publik dengan dalil konspirasi, karena sikap tersebut hanya akan menjadi makanan bagi media dan publik untuk semakin menjatuhkan citra PKS yang sudah terpuruk akibat kasus sapi, seperti pernyataan yang berasal dari kutipan berita berikut ini, "*Semakin mengingkari dan bereaksi dengan menuduh ada konspirasi, publik menilai itu sekadar demagogi politisi yang kena kasus.*"⁷⁶

Padahal *Kompas* menilai terungkapnya satu per satu kasus korupsi yang marak beberapa waktu belakangan ini hanyalah persoalan nasib dan waktu saja, persis seperti sebuah judul pemberitaan pada edisi 4 Februari 2013

yang berbunyi "Terungkapnya Korupsi Itu Arisan". Sama seperti kata 'arisan' yang dipahami masyarakat Indonesia, maka tidak ada yang tahu nama siapa yang akan keluar dan jadi 'pemenang' selanjutnya. Oleh karena itu, parpol yang sudah lebih dulu ketahuan melakukan korupsi tidak perlu bersikap defensif atau mencari kambing hitam, karena 'arisan' tersebut dipastikan berlangsung cukup adil.

Alih-alih melayangkan tudingan terhadap KPK, PKS justru diharapkan untuk mampu menunjukkan sikap lapang dada dan meminta maaf kepada publik atas kesalahan kadernya yang melakukan korupsi. Dengan begitu, boleh jadi publik justru akan simpati terhadap PKS sebagai partai yang konsisten mematuhi hukum sehingga citranya lebih cepat pulih. Selain itu, PKS juga diharapkan untuk melakukan introspeksi dan otokritik terhadap internal partai sambil menunggu berlangsungnya proses hukum terhadap kasus sapi. PKS juga diminta agar mau bekerjasama dengan KPK, misalnya dengan menyerahkan kader lain yang diduga ikut terlibat dalam kasus sapi.

Terungkapnya kasus sapi yang dianalogikan *Kompas* sebagai 'arisan yang fair', seakan mengartikan bahwa *Kompas* memilih untuk bersikap acuh terhadap kemungkinan adanya permainan politik di belakang kasus sapi. Bagi *Kompas*, reaksi defensif PKS itu sia-sia dan tidak ada ruang bagi PKS untuk menyudutkan KPK yang memiliki kredibilitas tinggi di mata masyarakat. Harapan narasumber *Kompas* agar PKS menyerahkan kader lain yang diduga ikut memiliki andil dalam kasus sapi, juga seakan membuktikan kecurigaan

publik sekaligus memojokkan posisi PKS untuk mengakui sesuatu yang belum tentu jelas kebenarannya.

Bagaimanapun, usaha membandingkan PKS dan Partai Demokrat oleh *Kompas* sama saja dengan usaha menyamakan kedudukannya dengan partai-partai yang sebelumnya sudah sering terlibat kasus korupsi. Sorotan tajam *Kompas* terhadap kasus sapi ini juga tidak bisa dipisahkan dari salah satu unsur penting, dimana PKS adalah partai politik yang mengusung simbol agama. Logikanya, bila parpol agama saja sudah terjerumus pada praktik korupsi, maka tak ada alasan untuk tidak menyamakannya dengan parpol lain yang tidak mengusung simbol agama.

Tabel 9

**Judul Berita, Isi Berita, dan Sumber Pemberitaan Konstruksi PKS
Pada Kasus Suap Impor Daging Sapi di *Kompas***

Judul Berita	Isi Berita	Sumber Berita
Perbaiki Sistem Politik Rusak	Kasus sapi menunjukkan bahwa sistem politik di Indonesia sudah rusak, dan PKS diharapkan dapat menjadi pelopor untuk membenahi kerusakan tersebut. Misalnya dengan mendukung upaya dan bekerja sama KPK dalam memberantas kasus sapi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. J. Kristiadi (Peneliti Centre For Strategic) 2. Ade Irawan (Wakil Koordinator ICW) 3. Roy Salam (Peneliti Indonesia Budget Center) 4. Marzuki Alic (Ketua DPR)

	Faktor pendanaan parpol yang didesain mahal disinyalir menjadi penyebab maraknya korupsi.	
PKS Diminta Legawa dan Hormati Proses Hukum	<p>Sikap defensif PKS yang menuding terjadinya konspirasi di KPK hanya akan memperburuk citra partai.</p> <p>PKS diminta melakukan koreksi dan otokritik terhadap internal partai. PKS juga disarankan untuk meminta maaf dan bersikap legawa agar citranya cepat pulih.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arie Sujito (Dosen Sosiologi UGM) 2. Sebastian Salang (Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia) 3. Sri Budi Eko Wardhani (Direktur Pusat Kajian Politik Departemen Ilmu Politik FISIP UI) 4. Mardani Ali Sera (Kabid Humas DPP PKS) 5. Muhammad Assegaf (Anggota Tim Kuasa Hukum Luthfi)
Terbongkarnya Korupsi Itu Arisan	<p>Korupsi sudah merupakan watak politik Indonesia, jadi terbongkarnya korupsi hanya tinggal menunggu waktu saja.</p> <p>Korupsi saat ini berbeda dengan masa Orde Baru, bila dulu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Mubarak (Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat) 2. Gitadi Tegat Supramudyo (Dosen Ilmu Administrasi)

	<p>karena ada kesempatan, tapi sekarang sudah diniatkan sejak awal menyusun anggaran.</p> <p>Peran dan fungsi lembaga pengawas keuangan dinilai tidak maksimal. Target kerja yang dibuat pemerintah juga tidak dibuat secara jelas hingga menyebabkan sulitnya menghitung keberhasilan program.</p>	<p>Publik UNAIR)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. J. Kristiadi (Peneliti Centre For Strategic) 4. Saldi Isra (Guru Besar Ilmu Hukum UNAND) 5. AAGN Dwipayana (Dosen FISIP UGM) 6. Theofransus Litaay (Ketua Bersama Pusat Studi Antikorupsi Univ. Kristen Satya Wacana)
<p>Korupsi Itu Bertentangan dengan Agama</p>	<p>Banyak kasus korupsi lainnya yang bersinggungan dengan tokoh agama.</p> <p>Citra KPK di masyarakat lebih kredibel dibandingkan PKS, sehingga masyarakat tidak percaya dengan tuduhan konspirasi politik yang dilontarkan internal PKS.</p> <p>Agama tidak bisa dijadikan standar normal penentu perilaku masyarakat. Lebih baik tegakkan norma hukum yang dipercaya dapat memberantas korupsi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ihsan Ali-Fauzi (Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina) 2. Ali Munhanif (Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) 3. Ade Irawan (Wakil Koordinator ICW) 4. Ilham Khoiri (Kompas)

<p>Jajak Pendapat "Kompas": Kasus Korupsi Batu Sandungan Parpol</p>	<p>Partai politik merupakan lembaga yang paling sering mendapat penilaian paling negatif sejak 3 tahun terakhir, disebabkan karena banyaknya kasus korupsi yang terungkap.</p> <p>Perbandingan perspektif masyarakat terhadap dua parpol besar yang terseret korupsi: Demokrat dan PKS.</p>	<p>Antonius Purwanto (Tim Litbang Kompas)</p>
<p>Masyarakat Kehilangan Model</p>	<p>Semua partai disinyalir telah terlibat korupsi.</p> <p>Harus ada langkah tegas dalam memperbaiki partai serta sistem politik di Indonesia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Burhanuddin Muhtadi (Peneliti Lembaga Survei Indonesia) 2. Marzuki Alie (Ketua DPR) 3. M. Sohibul Iman (Wakil Ketua DPR Fraksi PKS)
<p>KPK: Tenar di Tengah Keterbatasan</p>	<p>KPK pantas menyandang gelar "Institution of the Year" karena sepak terjangnya dalam memberantas korupsi selama ini.</p>	<p>Eri (Tim Litbang Kompas)</p>

<p>Jajak Pendapat "Kompas": Pertaruhan dalam Tubuh KPK</p>	<p>KPK sebagai lembaga hukum dicurigai telah disusupi kepentingan politik pihak tertentu. Walaupun begitu, beberapa ganjalan yang menghadang KPK seharusnya ditanggapi sebagai uji coba terhadap independensinya.</p> <p>Keberadaan KPK perlu diapresiasi, mengingat masih sedikitnya lembaga yang berani menegakkan hukum di Indonesia.</p>	<p>Indah Surya Wardhani (Tim Litbang Kompas)</p>
<p>Demokrat- PKS Kian Terpuruk</p>	<p>Elektabilitas kedua partai turun akibat petingginya terseret kasus korupsi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendy Kurnia (Direktur Riset LSJ) 2. Igor Dirgantara (Peneliti Senior LSJ) 3. Syarifudin Hasan (Dewan Pembina Partai Demokrat) 4. Didi Irawadi Syamsudin (Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Partai Demokrat) 5. Al Muzzammil Yusuf

		(Ketua DPP PKS)
Menimbang Partai Agama	<p>Simbol agama yang diusung parpol Islam memang mampu menarik perhatian masyarakat yang merasa terkait dengan emosi keagamaan. Namun di sisi lain, simbol-simbol itu justru menjadi bumerang ketika pengurus dan pemimpinnya terkait dengan kasus korupsi yang dianggap menyelewengkan agama.</p> <p>Parpol agama diminta memikirkan ulang eksistensinya di dunia politik Indonesia yang penuh dengan kompetisi memenangkan kekuasaan. Lagipula, masyarakat Indonesia sudah sangat plural saat ini, dan Indonesia juga lebih condong ke wacana Negara Kebangsaan, bukan Negara Agama</p>	Komaruddin Hidayat (Rektor UIN SYarif Hidayatullah Jakarta)
Bangsa Alami Disorientasi	Pemimpin negara dinilai lemah dan tidak bisa diteladani oleh masyarakatnya. Kondisi ini memicu kondisi lainnya, salah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Azyumardi Azra (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah) 2. A Syafii Maarif

	<p>satunya adalah proses anomi dimana masyarakat kehilangan pegangan terhadap nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Akibatnya elite politik korup, masyarakat bermental instan, dan aparat negara semakin brutal.</p> <p>Demokrasi dan desentralisasi yang terlalu cepat menghasilkan multipartai yang timbul pesat, sekaligus menghilangkan ideologi dan idealisme parpol. Politisi akhirnya menjadi pihak oportunist dengan berpindah partai semauanya.</p>	<p>(Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Taufik Abdullah (Sejarawan LIPI) 4. Siti Zuhro (Peneliti LIPI) 5. Yudi Latif (Direktur Eksekutif Reform Institute) 6. Franz Magnis-Suseno (Pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkarya) 7. Sarlito Wirawan Sarwono (Guru Besar Fakultas Psikologi UI) 8. Syamsudin Haris (Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI) 9. Ramlan Surbakti (Guru Besar Ilmu Politik UNAIR)
<p>Kebijakan Telah Lumpuh</p>	<p>Pendidikan politik dinilai masih minim dan tidak merata. Paham politik yang sudah menyebar luas juga dinilai tidak tepat karena masyarakat akhirnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yudi Latif (Direktur Eksekutif Reform Institute) 2. Yuddy Chrisnandi (Politisi Partai Hanura)

	<p>hanya mengerti tentang politik kekuasaan.</p> <p>Bangsa perlu benar-benar menegakkan Pancasila, dan mahasiswa bisa mengambil peran dalam upaya perbaikan.</p>	<p>3. Franz Magnis-Suseno (Pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkarya)</p> <p>4. Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina)</p> <p>5. Eddy Setiawan (Alumnus Himpunan Buddhis Indonesia)</p>
Pejabat Jujur Sulit Dicari	<p>Kriteria utama seorang pemimpin yang dibutuhkan Indonesia adalah yang memiliki kejujuran. Kepandaian, ketegasan, dan keberanian itu nomor kesekian.</p> <p>Pentingnya menanamkan kejujuran di rumah, lingkungan, maupun dalam hubungan kemasyarakatan.</p>	<p>Salahuddin Wahid (Pengasuh Pesantren Tebuireng)</p>
Arena Politik Ternak	<p>Korupsi menghancurkan kemanusiaan, dan kondisi politik saat ini sudah seperti di hutan rimba dimana yang berkuasa itulah yang menang.</p>	<p>Asep Salahudin (Dekan IAILM Pesantren Suryalaya)</p>

Sumber: Pilihan koran *Kompas* rentang edisi 31 Januari 2013 – 31 Mei 2013,
diolah kembali oleh peneliti

Tabel 10

**Grafis Pendukung dalam Pemberitaan Konstruksi PKS Pada Kasus
Suap Impor Daging Sapi di *Kompas***

Tanggal Pemberitaan	Judul Berita	Grafis Pendukung
2 Februari 2013	Perbaiki Sistem Politik Rusak	Grafik 'Pendanaan Partai Politik'
3 Februari 2013	PKS Diminta Legawa dan Hormati Proses Hukum	-
4 Februari 2013	Terbongkarnya Korupsi Itu Arisan	-
7 Februari 2013	Korupsi Itu Bertentangan dengan Agama	Foto Luthfi Hasan Ishaq seusai diperiksa KPK.
11 Februari 2013	Jajak Pendapat "Kompas": Kasus Korupsi Batu Sandungan Parpol	Grafik survey Kompas mengenai perspektif masyarakat terhadap PKS dan Partai Demokrat
15 Februari 2013	Masyarakat Kehilangan Model	-
18 Februari 2013	Jajak Pendapat "Kompas": Pertaruhan dalam Tubuh KPK	Diagram 'Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja KPK', 'Penilaian Puas Terhadap Kinerja KPK', dan 'Citra Positif

		KPK di Mata Publik’.
		Tabel ‘Kasus yang Ditangani KPK’ sejak 2008-2012 berdasarkan jenisnya.
	KPK: Tenar di Tengah Keterbatasan	-
20 Februari 2013	Demokrat-PKS Kian Terpuruk	-
	Menimbang Partai Agama	Karikatur Luthfi Hasan Ishaq
9 Maret 2013	Bangsa Alami Disorientasi	-
11 Maret 2013	Kebajikan Telah Lumpuh	-
22 Maret 2013	Pejabat Jujur Sulit Dicari	Karikatur papan catur
18 Mei 2013	Arena Politik Ternak	-

Sumber: Pilihan koran *Kompas* rentang edisi 31 Januari 2013 – 31 Mei 2013, diolah kembali oleh peneliti.

Dari 14 berita *Kompas* yang dijadikan objek penelitian ini, ada sekitar 42 narasumber yang secara langsung berkontribusi memberikan tanggapan, pernyataan, analisis, maupun sikap kritis terhadap konstruksi PKS lewat mencuatnya kasus sapi. Narasumber tersebut memiliki latar belakang pekerjaan dan fokus yang berbeda-beda. Namun, para akademisi dari

UNAND, dan sebagainya, menempati posisi tertinggi dalam pemberitaan *Kompas*, yaitu sebanyak 14 suara dari total keseluruhan.

Latar belakang pendidikan akademisi tersebut tidak hanya di bidang politik dan hukum, namun juga agama, psikologi, dan filsafat. Peneliti menilai hal ini sebagai upaya *Kompas* untuk memperluas sudut pandang dalam mengupas sebuah isu yang terjadi pada realitas sosial. Banyaknya jumlah narasumber dari kalangan pengajar / dosen juga seakan mengartikan bahwa *Kompas* menaruh kepercayaan terhadap para akademisi sebagai pihak yang dinilai memiliki wawasan luas dan citra yang baik di tengah masyarakat, sehingga mampu membahas sebuah persoalan secara keseluruhan dan mendalam.

Narasumber terbanyak berikutnya berasal dari politisi yang memang memahami dan berkiprah di dunia politik itu sendiri, yaitu ketua DPR, kader PKS dan Partai Demokrat, serta satu orang perwakilan dari Partai Hanura. Narasumber berikutnya berasal dari lembaga penelitian seperti Centre Strategic for International Studies (CSIS) yang memang sering melakukan penelitian dan analisis strategis pada bidang politik, ekonomi, dan keamanan nasional; lalu ada juga perwakilan LIPI; serta Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia yang mewakili kepedulian dan suara masyarakat umum.

Kompas juga memasukkan narasumber dari berbagai lembaga survey yang menerjemahkan persepsi masyarakat terhadap PKS, Partai Demokrat, maupun KPK ke dalam perhitungan yang sistematis seperti LSI, LSJ, Reform Institute, dan Indonesia Budget Centre. *Kompas* juga menunjukkan hasil

survey yang berasal dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan milik *Kompas* atau yang biasa disebut dengan Litbang Kompas. Hasil survey tersebut dinilai cukup berpengaruh karena *Kompas* sendiri sudah dipandang masyarakat sebagai media cetak nasional yang mempunyai reputasi baik.

Anggota dari lembaga keagamaan juga menjadi narasumber dalam pemberitaan *Kompas*, dan itu tidak hanya dari kalangan organisasi Islam saja, namun juga anggota Budhis Indonesia. *Kompas* seakan ingin menunjukkan sikap plural yang sudah sedemikian berkembang di Indonesia. Selain itu, *Kompas* juga sering mengaitkan gagasan para tokoh besar dalam ulasan pemberitaannya seperti Cak Nur, Gus Sholah, dan Michael Foucault. Dari segi penempatan berita, kasus sapi PKS kebanyakan ditaruh di rubrik Politik dan Hukum- yaitu sebanyak delapan berita, sedangkan di *Headline* dan rubrik Opini masing-masing tiga berita.

b. *Causal Interpretation*

Merajalelanya kasus korupsi termasuk mencuatnya kasus sapi PKS dinilai *Kompas* bukan hanya sebagai permasalahan internal partai saja, namun juga bagian dari persoalan bangsa yang menuntut tindakan penyelesaian yang kontinyu dan konsisten. Oleh karena itu, *Kompas* mengidentifikasi dua penyebab utama sebagai sumber masalah dalam konstruksi PKS kali ini, salah satunya berasal dari eksternal partai yaitu rusaknya sistem politik dan kepartaian yang notabene dibentuk dan diatur oleh negara. Hal ini

pada awal pemberitaan kasus sapi, seperti yang disampaikan seorang peneliti senior di salah satu lembaga penelitian politik dalam kutipan berita berikut:

Penetapan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq sebagai tersangka dugaan kasus suap impor daging sapi merupakan isyarat kuat rusaknya sistem politik di Indonesia. Upaya memperbaiki sistem politik yang rusak ini harus dilakukan bersama dan PKS punya momentum untuk memepori. (Kompas, 2 Februari 2013, paragraf 1).

Partai politik memang merupakan salah satu elemen terpenting dari sistem pemerintahan yang menganut demokrasi. Salah satu fungsinya adalah sebagai sarana penghubung utama antara rakyat dengan pemerintah dalam hal artikulasi dan agregasi kepentingan, atau dengan kata lain sebagai jembatan antara aspirasi rakyat dan pembuatan kebijakan publik. Bentuk dan peran partai politik tersebut dipengaruhi oleh banyak hal, seperti perkembangan demokrasi negara itu sendiri, adanya kultur politik, sejarah, maupun kondisi negara yang berbeda dengan negara lain.

Indonesia sendiri yang digolongkan sebagai negara demokrasi baru (*third wave democracy state*) mengadopsi model sistem kepartaian dari negara yang sudah maju seperti Amerika, Eropa, maupun Jepang. Adopsi ini kemudian tidak berkembang murni seperti aslinya, namun dipengaruhi falsafah maupun ideologi yang dapat dikatakan sebagai keharusan hakiki dalam mewujudkan eksistensi di negara yang bersangkutan. Sehingga jadilah sistem politik yang ada di Indonesia saat ini disebut sebagai Sistem Politik Demokrasi Pancasila.⁷⁷

Sayangnya ketika diterapkan di Indonesia, sistem kepartaian tersebut lebih banyak memperlihatkan konflik parlementer ketimbang agregasi kepentingan sehingga ketidakpuasan masyarakat pun muncul dan berkembang.⁷⁸ Fungsi partai politik mengalami pergeseran dan dianggap sebagai perusak fungsi demokrasi yang juga memperlebar jurang kemakmuran di masyarakat. Begitu pun dengan sistem politiknya yang saat ini dinilai bermasalah dan tidak cukup efektif untuk menahan para politisi dari perilaku korupsi

Kompas juga menjelaskan hubungan sebab-akibat yang mempengaruhi rusaknya sistem politik di Indonesia secara luas dalam beberapa analisis pemberitaannya. Misalnya pada sebuah analisis mengenai permasalahan bangsa yang ditampilkan *Kompas* pada *headline* edisi 9 Maret 2013. Analisis tersebut berjudul “**Bangsa Alami Disorientasi**” dengan sub judul *Elite Masyarakat Munafik dan Tak Memberikan Keteladanan*. Dari seluruh pemberitaan *Kompas* yang dijadikan objek dalam penelitian ini, judul tersebut memiliki jumlah narasumber paling banyak yaitu sembilan orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Secara garis besar, tanggapan dan pernyataan dari narasumber tersebut mengarah kepada berbagai faktor pendorong rusaknya sistem politik dan kepartaian Indonesia.

Salah satunya adalah faktor pemimpin bangsa yang tidak bisa menjadi sosok teladan bagi rakyatnya. Pemimpin dinilai tidak tegas dalam mengatur dan mengelola bangsa yang multikultur, serba ragu dalam membuat keputusan

ataupun kebijakan, dan tak sungguh-sungguh melaksanakan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. *Kompas* meyakini, sosok pemimpin yang tidak bisa diteladani hanya melahirkan ketidakpastian dalam berbagai hal dan bangsa pun mengalami proses anomie, yaitu kehilangan pegangan terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Hal ini persis yang disampaikan oleh Taufik Abdullah, seorang sejarawan dari LIPI berikut ini, "*Kita akhirnya mengalami proses anomie, yaitu kehilangan pegangan terhadap nilai-nilai moralitas. Orang-orang kehilangan batas-batas baik-buruk atau salah-benar. Ini memicu perilaku menyimpang dan konflik di masyarakat.*" kata Taufik.⁷⁹

Masyarakat jadi memiliki mental instan ingin cepat kaya dan gampang marah, sedangkan aparat negara bertindak brutal terhadap rakyatnya sendiri. Nilai moral menjadi tumpul bahkan rusak, sedangkan nilai-nilai kebaikan semakin terkikis. Lebih jauh, proses anomie mengakibatkan orang mudah saling curiga, tidak percaya lagi pada hukum, dan akhirnya hanya memicu perilaku menyimpang dan konflik di tengah-tengah masyarakat. Sesuai dengan pernyataan seorang akademisi dari UTN Syarif Hidayatullah dalam kutipan berita berikut ini:

"Disorientasi nilai terjadi hampir di berbagai aspek kehidupan. Publik terlampau sering melihat kemunafikan pemimpin yang tidak memiliki integritas sehingga sebagian masyarakat juga mengambil jalan menerabas, mencari jalan mudahnya, dan tidak lagi percaya pada hukum," kata Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra. (*Kompas*, 9 Maret 2013, paragraf 3).

Di sisi lain, konsolidasi atau bersatunya berbagai kekuatan di sistem demokrasi belum terwujud. Desentralisasi atau penyerahan kewenangan ke pemerintah daerah juga dinilai terlalu cepat, sehingga melahirkan multipartai dan elite politik yang justru kehilangan ideologinya. Perilaku politisi akhirnya hanya didasarkan pada kepentingan masing-masing (oportunist) yang mana semakin menyuburkan perilaku korupsi. Politisi juga menjadi adventuristik (leluasa berpetualang) dalam hal berpindah partai, sehingga tidak ada bekal ideologi maupun nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan kepada para kader.

Bila dilihat dari sistem kepartaian, penyebab maraknya korupsi juga disebabkan oleh mahalnya biaya yang didesain untuk jadi calon anggota legislatif dalam Pemilu. Parpol juga tidak diberi kewenangan membuat badan usaha sendiri sebagai sumber dana serta dilarang mencari dana di luar batas yang telah ditetapkan, seperti yang diungkapkan ketua DPR Marzuki Alie berikut ini, *“Korupsi terjadi karena tidak ada kejelasan peraturan tentang pendanaan parpol. Parpol juga tidak diberi kewenangan mencari sumber dana lain di luar iuran anggota, sumbangan pribadi dan perusahaan, serta bantuan pemerintah.”*⁸⁰ Selain itu, kurang maksimalnya pengawasan pemerintah seperti Badan Pengawas Keuangan (BPK) juga memungkinkan politisi untuk melakukan kecurangan saat menyusun kebijakan dan anggaran, yang mana hal ini terkesan lazim di kalangan politisi Indonesia.⁸¹

Faktor pendorong lain yang menyebabkan rusaknya sistem politik adalah pemerintahan otoriter yang pernah diberlakukan di Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Menurut sejarawan dari LIPI, faktor sejarah ini berpengaruh pada sikap bangsa yang akhirnya mengadopsi sikap otoriter tersebut, dimana masyarakat selalu merasa benar dan mau menang sendiri. Sifat otoriter itu semakin berkembang bersamaan dengan terbukanya ruang kebebasan, demokrasi, dan otonomi daerah.⁸²

Parahnya, warisan sikap otoriter tersebut tidak dibarengi dengan pendidikan politik yang memadai untuk masyarakat. Apalagi selama ini bangsa Indonesia juga dinilai telah menganut aliran politik yang salah, yaitu sistem politik Machiavellian yang hanya berorientasi pada kekuasaan. Masyarakat pun hanya memahami politik sebatas meraih, mempertahankan, dan menikmati kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Semua itu akhirnya mengarahkan perilaku masyarakat pada konflik kepentingan.

Beragam persoalan di atas juga tidak terlepas dari pengaruh era informasi yang demikian bebas, dimana tidak ada lagi pegangan yang bisa digunakan untuk menyaring informasi antara benar dan salah. Media massa seperti televisi juga lebih banyak menunjukkan politik tidak etis karena masing-masing pimpinannya memiliki kepentingan politik tertentu. Padahal televisi dianggap sebagai media yang paling mampu mempengaruhi masyarakat dalam membentuk atau mengubah citra tokoh maupun parpol dalam waktu yang amat singkat.

perilakunya tetap saja menyimpang. Apalagi bila terbiasa berada dalam lingkungan yang mendorong terciptanya kebutuhan tinggi dan konsumerisme yang menggila. Penegasannya disampaikan dalam kutipan berita berikut ini:

“Faktanya negara-negara dengan tingkat ketaatan beragama tinggi juga adalah negara-negara terparah korupsinya. Misalnya Pakistan, India, Banglades, juga Indonesia. Politisi, sekuler atau religious, bisa korup. Itu menyangkut agama apa saja,” catatnya. (Kompas, 7 Februari 2013, paragraf 9).

Alih-alih memandang agama sebagai solusi dari perilaku korupsi, *Kompas* memilih menonjolkan superioritas hukum yang dipandang lebih mampu menegakkan kebenaran dan memberantas korupsi di Indonesia. Maka ketika KPK memproses Luthfi sebagai tersangka korupsi, hal tersebut tidak lagi dilihat murni sebagai kesalahan partai, namun lebih kepada pembuktian persepsi khalayak atas ketidakefektifan dan bobroknya sistem politik Indonesia saat ini

c. *Moral Evaluation*

Pada elemen *framing* Entman berikut ini, *Kompas* menonjolkan nilai-nilai moral yang bertujuan untuk menegaskan argumen di dua elemen sebelumnya. Salah satunya adalah mengenai keterkaitan unsur agama dengan partai politik yang melakukan korupsi. *Kompas* menyikapi hal ini dengan mengajak pembaca untuk tidak terlalu terkejut dengan kasus sapi yang menimpa mantan presiden PKS; karena sebelumnya pun sudah banyak agamawan yang terseret kasus korupsi. Seperti opini tunggal yang

Agama, kata Ihsan, bukanlah yang terpenting untuk menentukan perilaku. Lidah seseorang boleh mengucapkan kalimat-kalimat bijak agama, tetapi bisa jadi perilakunya menyimpang. Apalagi ada dorongan kebutuhan material tinggi, konsumerisme menggila. (Kompas, 7 Februari 2013, paragraf 8).

Kompas bahkan merilis daftar nama sejumlah tokoh agama lengkap dengan kasus korupsinya masing-masing. Peneliti melihat ini sebagai upaya *Kompas* untuk membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada hubungan antara politisi yang korupsi dengan agama yang dianut. Larangan keras praktik korupsi dalam ajaran Islam tidak dapat diimplementasikan secara baik oleh para kader yang dalam realitasnya memiliki kekuasaan dan seringkali dihadapkan pada kesempatan dan kondisi yang memungkinkan untuk melakukan praktik korupsi.

Atas dasar tersebut, *Kompas* menilai bahwa perkembangan parpol agama dinilai tidak bisa sejalan dengan dunia politik di Indonesia. Memang, masyarakat Indonesia cukup dikenal memiliki semangat beragama yang tinggi, sehingga sangat masuk akal kalau di sini akhirnya banyak bermunculan parpol yang memiliki agenda keagamaan. Atau dengan kata lain, diperlukan panggung politik dan kekuasaan untuk mendukung perjuangan para kader dalam menegakkan nilai-nilai agama. Lagipula umat Islam juga akan lebih mudah bersimpati kepada parpol agama karena merasa memiliki ikatan dengan emosi keagamaan dan simbol-simbol yang diusung.

Masalahnya adalah realitas politik di Indonesia saat ini berada pada kondisi gaduh yang sarat dengan kompetisi sekaligus intrik dan mampu

salah maupun halal dan haram tidak lagi menjadi jelas. Permainan politik di Indonesia mudah sekali membuat aktornya tergelincir pada pertarungan kekuasaan dan kemenangan, meskipun harus mengalahkan prinsip etika dan nurani. Atas dasar tersebut, *Kompas* menilai jalannya parpol agama di Indonesia tidaklah mulus karena tidak sesuai dengan paham yang dianut.

Kompas menunjukkan sebuah contoh yang bisa menggambarkan kondisi yang dimaksud, yakni ketika kasus sapi PKS mencuat. Identitas dan afiliasi keagamaan yang awalnya lekat dengan semangat keagamaan masyarakat, tiba-tiba berubah menjadi beban dan senjata makan tuan. Mantan presiden PKS selaku tersangka korupsi dianggap telah melanggar dan melecehkan ajaran agama. Masyarakat yang tidak terima akan menunjukkan kemarahan dan hujatan dua kali lipat daripada ketika korupsi itu dilakukan aktor lain yang tidak mengusung simbol-simbol agama.

Kompas kembali membuktikan argumennya mengenai ketidakcocokan hubungan antara agama dan partai politik lewat sikap fanatik para simpatisan. Michael Foucault, seorang filsuf dan intelektual ternama dari Perancis yang *concern* di bidang institusi sosial dan ilmu-ilmu kemanusiaan, menyatakan bahwa agama memang menduduki stadium teratas dari faktor-faktor yang bisa menghipnosis seseorang agar berada dalam kekuatan absolut. Faktor agama mampu mengalahkan simbol lain seperti etnik, budaya, sosial, dan ekonomi. Sayangnya, bila agama tersebut dipahami dengan cara yang

salah untuk kepentingan politik misalnya maka hal tersebut hanya akan

membuat para pengikut, simpatisan, dan kader menutup mata alias tidak peduli dengan fakta yang sebenarnya.

Penyelewengan agama akan dinilai hal yang wajar bagi kader yang memiliki sikap fanatic terhadap partai. Ini membuktikan bahwa fanatisme itu jangkarnya adalah kecintaan buta, kepatuhan mutlak, hilangnya akal sehat, dan selalu melihat persoalan secara hitam putih: bipolar. Hal ini berlangsung tak hanya dalam domain agama, tapi juga politik, budaya, dan etnik. Mereka akhirnya akan melihat berbagai penyimpangan yang dilakukan petinggi atau kadernya secara tidak obyektif dan bersikap memaklumi serta memaafkan.⁸⁴

Nilai moral kedua yang diangkat oleh *Kompas* adalah mengenai legitimasi KPK dalam perspektif masyarakat. Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Ali Munhanif menilai, agama tak bisa sendirian melawan praktik korupsi. Batasan-batasan moral agama tidak cukup kuat untuk mendorong seseorang tetap bermoral ketika memperoleh peluang dan punya kekuasaan. Perlu batasan-batasan legal yang bisa memaksa siapa pun untuk mematuhi larangan korupsi.

Oleh karena itu, *Kompas* berupaya menunjukkan legitimasi KPK yang dianggap lebih kuat daripada PKS dengan menurunkan dua artikel penuh di satu edisi pemberitaan mengenai KPK yang ditulis langsung oleh Litbang *Kompas*. Artikel pertama adalah jajak pendapat yang dilakukan *Kompas* dengan tujuan mengetahui perspektif masyarakat terhadap independensi atau kemandirian KPK sebagai lembaga hukum. Sebagaimana telah diketahui

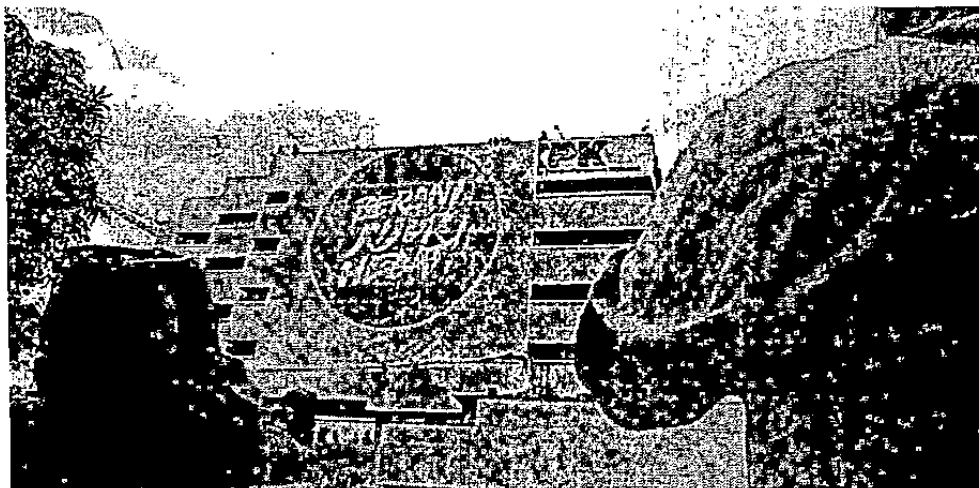
⁸⁴ *Kompas, Arena Politik Ternak*, edisi 18 Mei 2013.

sebelumnya, kredibilitas KPK mengenai hal tersebut sempat tercoreng akibat bocornya draf surat perintah penyidikan Anas Urbaningrum.⁸⁵

Di pemberitaan tersebut, *Kompas* menunjukkan dukungan penuh terhadap KPK sebagai lembaga yang diharapkan dapat menghapuskan korupsi di Indonesia hingga tuntas. Peneliti melihat ini sebagai upaya *Kompas* untuk membangun sebuah realitas sosial terhadap legitimasi KPK lewat harapannya yang disampaikan atas nama masyarakat. *Kompas* memang menjelaskan beberapa kelemahan yang dimiliki KPK, namun jumlahnya tak lebih banyak dari penilaian positif yang ditujukan pada KPK.

Gambar 7

Baliho Jargon di Gedung KPK



Sumber:

<http://nasional.kompas.com/read/2013/01/30/01300849/KPK.Tangkap.>

Empat.Orang.Terkait.Korupsi

Bocornya draf penyidikan elite politik memang cukup menarik perhatian masyarakat yang kemudian mempertanyakan profesionalisme dan kesolidan anggota KPK. Penanganan KPK dalam keterlibatan Anas dalam kasus Hambalang yang terkesan berlarut-larut semakin membuat responden mengindikasikan adanya kepentingan politik atau intervensi dari pihak tertentu. Penanganan koruptor yang masih dinilai bersifat tebang pilih juga memunculkan tanggapan bahwa penangkapan yang dilakukan KPK masih belum mampu memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi. Alih-alih jera, perilaku korupsi ini justru malah semakin banyak terungkap di tengah eksistensi gangguan yang melanda tubuh KPK itu sendiri. Kelemahan lain KPK yang diungkapkan *Kompas* adalah lemahnya vonis sidang yang diberikan terhadap pelaku korupsi, yang seringnya tidak sepadan dengan hiruk-pikuk kondisi penangkapan dan penetapan tersangka.

Namun di balik semua kelemahan itu, *Kompas* juga mengajak masyarakat luas untuk terus memberikan dukungan terhadap KPK. Sebagai penegak hukum dengan kekuatan penetrasi penyidikan paling besar, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja KPK yang saat ini dipimpin oleh Abraham Samad masih jauh lebih baik dibanding kejaksaan, kepolisian, dan kehakiman.⁸⁶ Hal ini dibuktikan dengan hasil survey *Kompas* dimana kepuasan responden meningkat menjadi 57,6 persen pada September 2012.

Menurut *Kompas*, KPK sebenarnya sudah mencoba mengupayakan

begitu publik dinilai belum sepenuhnya memahami bagaimana transparansi yang dilakukan KPK tersebut. Sejauh ini, barometer kepuasan masyarakat tersebut dinilai dari keberhasilannya mengungkap kasus korupsi kelas kakap yang melibatkan para elite parpol, seperti Luthfi dan Anas. Semakin banyak kasus korupsi terungkap dengan cepat, maka semakin meningkat pula tingkat kepercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk terus mendukung KPK karena tidak mudah berjuang menegakkan hukum dan memberantas korupsi di tengah minimnya dukungan dan kondisi politik seperti saat ini. Apalagi, bukan sekali dua kali KPK telah merasakan upaya penggembosan sejak lembaga ini berdiri pada tahun 2003. Berbagai cara untuk melemahkan KPK sering terjadi bersamaan dengan terjadinya pengusutan kasus besar, seperti kriminilisasi terhadap pemimpin KPK, pengurangan kewenangan penyadapan, hingga penarikan penyidik Polri.

Selain jajak pendapat mengenai perspektif masyarakat terhadap KPK, *Kompas* juga menurunkan analisis tunggal yang kembali diterbitkan oleh pihak Litbang *Kompas*. Bagi *Kompas*, KPK pantas diberi gelar '*Institution of the Year*' karena telah menjadi lembaga yang paling sering menghiasai berita utama media massa dan elektronik beberapa waktu terakhir.⁸⁷ Inti pemberitaan ini ditegaskan *Kompas* dalam satu paragraf seperti berikut ini:

Berdasarkan pemantauan Litbang *Kompas* terhadap berita utama halaman satu pada enam koran nasional dalam kurun dua tahun terakhir, KPK merupakan institusi penegak hukum yang paling banyak

dibeitakan.. Tidak hanya sepak terjang dalam memberantas korupsi, upaya pelemahan dan dulungan publik terhadap lembaga ini juga kerap menjadi pemberitaan utama berbagai media. (Kompas, 18 Februari 2013, paragraf 2).

Upaya menunjukkan legitimasi KPK oleh *Kompas* ini bukan tanpa dasar. Peneliti melihatnya sebagai sikap *Kompas* yang menitikberatkan kekuatan dan moral hukum sebagai kekuatan utama, paripurna, dan yang dinilai sebagai cara yang paling superior atau memiliki kemampuan untuk memberantas perilaku korupsi hingga ke akar-akarnya. Sama seperti alasan para pendiri NKRI dulu yang sepakat bahwa harus diadakan Undang-Undang Dasar atau konstitusi sebagai bagian dari hukum dasar untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.⁸⁸

Bagi *Kompas*, batasan-batasan moral agama tidak cukup kuat untuk mendorong seseorang tetap bermoral kerika memperoleh peluang dan punya kekuasaan. Perlu batasan-batasan legal yang bisa memaksa siapa pun untuk mematuhi larangan korupsi, salah satunya adalah dengan menyatukan dukungan dari berbagai pihak untuk menegakkan dan menjalankan hukum dengan benar. Seperti yang disampaikan oleh Ali Munhanif, Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat berikut ini, "*Kita memerlukan penegakan hukum tegas dan adil serta memperkuat lembaga pemberantasan korupsi,*" katanya.⁸⁹

⁸⁸ Triwahyuningsih, *Pemilihan Presiden Langsung dalam Kerangka Negara Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta, 2011, hal 39.

⁸⁹ Ali Munhanif, "Kita memerlukan penegakan hukum tegas dan adil serta memperkuat lembaga pemberantasan korupsi," Kompas, 18 Februari 2013.

d. Treatment Recommendation

Seperti yang telah dijelaskan di elemen-elemen Entman sebelumnya, *Kompas* menilai kasus sapi dan PKS hanya sebagian kecil dari realitas media yang dibangunnya sejak awal. Kasus sapi dan PKS sebenarnya berada di wilayah persoalan bangsa karena telah menyangkut sistem politik dan kepartaian yang notabene dibentuk oleh pemerintahan. Oleh karena itu *Kompas* meyakini bahwa solusi penyelesaian dari bobroknya sistem tidak dapat ditanggulangi sendiri oleh internal partai, tapi juga membutuhkan seluruh bantuan dari pemerintah maupun masyarakat umum. *Kompas* mengharapkan bangsa ini dapat bangkit dan bahu membahu dalam menegakkan kembali tujuan yang terkandung pada nilai-nilai Pancasila.⁹⁰

Kompas mengarahkan rekomendasi penyelesaian yang pertama bagi pihak pemerintahan, yaitu untuk segera memformat ulang regulasi sistem politik dan kepartaian. Sistem harus diperbaiki dan dibuat sedemikian efektif dengan dukungan serta pengawasan dari berbagai pihak. Penegakkan hukum juga perlu dilakukan secara tegas dan adil. Lembaga pemberantasan korupsi harus didukung dan diperkuat dari sisi internal maupun eksternal.

Meminimalkan pengorupsian anggaran juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan lembaga pengawas keuangan dan menjalankan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah, khususnya oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penganggaran juga

harus dibuat dengan berdasar pada kinerja kader, bukan pada perkiraan yang dapat memunculkan peluang korupsi.⁹¹

Pada sisi partai politik, *Kompas* menyarankan agar keuangan partai dibuat transparan dan partai politik juga harus membuat ruang akses bagi masyarakat agar dapat mengontrol kinerja parpol. Kualitas para aktor politik harus ditingkatkan, salah satunya dengan melakukan perbaikan di bidang kaderisasi dan perekrutan politik. Parpol juga harus memberlakukan sanksi ketat bagi para pelaku korupsi. Misalnya bila ada anggota kader yang memiliki rekening bermasalah harus segera direposisi, jika tidak terbukti akan dikembalikan ke posisi semula.⁹²

Partai politik juga harus mampu mengusung calon pemimpin negara dan anggota legislatif yang berkualitas dalam Pemilu 2014. Para pemimpin tersebut dipastikan harus memiliki integritas yang menyokong kemajuan bangsa.⁹³ Terlebih lagi, para parpol harus mampu menampilkan sosok pemimpin yang memiliki kriteria jujur. *Kompas* menegaskan pentingnya menanamkan kejujuran dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Salahuddin Wahid di *Kompas* edisi 22 Maret 2013 di rubrik opini berjudul “**Pejabat Jujur Sulit Dicari**”. Salahuddin Wahid atau biasa disebut Gus Sholah menyatakan bahwa kejujuran menjadi penilaian paling penting yang dibutuhkan dari seorang pemimpin. Aspek tersebut bahkan mengalahkan aspek lain seperti kepandaian, ketegasan, ataupun keberanian. Gus Sholah

⁹¹ *Kompas, Terbongkarnya Korupsi Itu Arisan*, edisi 4 Februari 2013.

⁹² *Kompas, Masyarakat Kehilangan Model*, edisi 15 Februari 2013.

⁹³ *Kompas, Bangsa Alami Disorientasi*, edisi 9 Maret 2013.

juga menyinggung kejujuran tersebut dalam konteks agama. Menurutnya semua agama pasti menganjurkan kejujuran, masalahnya adalah bagaimana kita bisa menanamkan kesadaran kepada diri sendiri maupun orang lain tentang pentingnya kejujuran.

Pendidikan mengenai kejujuran ini dapat dimulai dari lingkup keluarga, artinya peran orangtua memiliki porsi paling besar untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran tersebut, bukan dari sekolah atau lingkungan masyarakat. Para orangtua harus paham bahwasanya mereka adalah pendidik utama anak-anak. Para ahli psikologi diharapkan dapat membantu memberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai metode yang paling baik dalam menanamkan kejujuran pada anak. Bila masyarakat memiliki kesadaran dan perjuangan bersama, diharapkan nantinya kita tak kesulitan lagi dalam mencari pejabat jujur di Indonesia.

Rekomendasi penyelesaian berikutnya ditujukan untuk PKS sebagai partai yang terkena kasus agar melakukan perbaikan. Dimulai dengan introspeksi diri kemudian memperkuat konsolidasi kader dari tingkat daerah hingga pusat.⁹⁴ Komitmen anti-korupsi harus diperbaiki dan dilafalkan tidak hanya sebagai janji partai, namun kesadaran bersama agar di kemudian hari tidak akan terulang lagi kasus sapi Luthfi. *Kompas* juga menyarankan salah satu rekomendasi ekstrem yang ditujukan untuk seluruh parpol Islam atau yang diidentikkan sebagai parpol Islam di Indonesia.

⁹⁴ *Kompas, Perbaiki Sistem Politik*, edisi 2 Februari 2013,

Dalam persepsi masyarakat Indonesia ada 4 parpol yang dipandang sebagai partai Islam, meskipun menyatakan diri sebagai partai terbuka, yaitu PPP, PKS, PKB, PAN. Bagi *Kompas*, sepertinya akan lebih baik apabila parpol Islam berfikir ulang mengenai format dan eksistensi parpol agama. Seperti yang ditulis Komaruddin Hidayat, rektor UIN. Syarif Hidayatullah pada *Kompas* edisi 20 Februari 2013 berjudul “Menimbang Partai Agama”. Merosotnya gairah keagamaan masyarakat Indonesia saat ini dipandang sebagai faktor pendukung argumennya tersebut. Hal ini dibuktikan dengan turunnya hasil survei terhadap parpol yang mengusung simbol dan sentimen keagamaan, begitu juga yang terjadi pada majalah dan surat kabar yang secara eksplisit menyebut dirinya sebagai media Islam.⁹⁵

Hal tersebut setidaknya mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia saat ini sudah sedemikian pluralnya dan negara juga menjamin kebebasan hidup beragama. Apalagi saat ini sekularisasi sistem politik di Indonesia semakin menguat, dimana argumentasi atau wacana yang berkembang lebih condong menjadikan Indonesia sebagai negara kebangsaan, bukan negara agama. Agama memang tumbuh dan bergerak, namun itu sebatas wilayah individu dan masyarakat, tidak sampai mampu mengatur negara.

Lebih dari itu, Komaruddin Hidayat juga menyatakan bahwa sebenarnya banyak orang Islam yang memiliki komitmen keislaman tinggi tapi lebih merasa nyaman berada di luar partai. Dirinya seakan ingin mempertegas bahwa kendaraan politik umat Islam mempunyai lebih banyak

⁹⁵ *Kompas*, *Menimbang Partai Agama*, edisi 20 Februari 2013.

pilihan sehingga tidak perlu bergabung dengan dunia politik lewat kepartaian. Pemikirannya ini berangkat dari gagasan yang sempat dilontarkan almarhum Cak Nur (Nurcholish Madjid) pada tahun 1970-an tentang "Islam-Yes, Partai Islam-No?"

Gagasan Cak Nur tersebut muncul dari hasil bacaan sosialnya mengenai partai-partai Islam yang punya kecenderungan untuk mengklaim dirinya sebagai satu-satunya wadah bagi penyaluran aspirasi politik umat Islam. Umat Islam mesti memilih partai Islam, kalau tidak keislamannya dipertanyakan. Padahal mayoritas penduduk Indonesia itu Muslim dan tidak realistis bila hanya terwadahi dalam satu partai agama. Komaruddin Hidayat kemudian menyarankan untuk memikirkan kembali eksistensi dan format parpol agama. Mungkin akan lebih baik bagi partai agama bila berubah menjadi partai terbuka yang tidak membatasi diri berdasarkan ideologi agama yang dianut, seperti dalam kutipan teks berikut ini:

Ketiga sinyalemen di atas mendorong kita berpikir ulang untuk menimbang eksistensi dan format parpol yang berciri keagamaan yang secara sadar ingin mencari dukungan massa dengan membangkitkan emosi agama. (Kompas, 20 Februari 2013, paragraf 8).

Kompas juga menaruh harapan pada masyarakat khususnya masyarakat sipil independen untuk mulai membuat perubahan. Kalangan tersebut misalnya yang berasal dari masyarakat berbasis agama, kelompok gerakan edukasi-advokasi, ataupun dari kalangan media massa dan mahasiswa. Kalangan ini perlu mengontrol sekaligus memberi tekanan ke

menghasilkan kinerja yang maksimal dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Di saat yang sama, kalangan tersebut juga diharapkan dapat memberikan bimbingan, kesejukan, dan harapan bagi masyarakat yang ada di bawah untuk tetap memelihara harapan demi kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya.⁹⁶

Tabel 11

Frame* PKS dalam Kasus Suap Impor Daging Sapi di *Kompas

<i>Frame</i>	Mencuatnya kasus sapi membuat PKS diasumsikan sebagai partai yang sama korupnya dengan partai lain.
<i>Problem Identification</i>	Kasus sapi bukan hanya persoalan internal partai PKS, tapi juga permasalahan umum bangsa Indonesia.
<i>Causal Interpretation</i>	Sistem politik rusak dan tidak kuatnya faktor agama adalah penyebab masalah bagi PKS maupun partai lain yang rentan terhadap godaan korupsi.
<i>Moral Evaluation</i>	Budaya korupsi di antara agamawan bukan isu baru yang mengejutkan;

	<p>Perkembangan parpol Islam di dinilai tidak sejalan dengan kondisi politik di Indonesia; PKS tak pantas bersikap defensif terhadap KPK karena legitimasi dan kredibilitasnya lebih dipercaya masyarakat.</p>
<p><i>Treatment Recommendation</i></p>	<p>Pemerintah harus membenahi sistem politik agar lebih efektif dan dapat terkontrol; PKS harus melakukan otokritik dan membenahi internal; Parpol secara umum menetapkan sanksi ketat terhadap kadernya yang korup serta memikirkan ulang eksistensi dan format parpol agama; Masyarakat harus mampu mengontrol kinerja parpol dan pemerintahan.</p>

Sumber: Hasil olah data dan analisis penelitian dari koran *Kompas* rentang edisi 31 Januari 2013 – 31 Mei 2013.

C. Perbedaan Konstruksi PKS Lewat Mencuatnya Kasus Sapi di *Republika* dan *Kompas* Edisi Januari – Mei 2013.

Pembingkaian berita terkait konstruksi PKS pada kasus sapi yang melibatkan mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq telah dianalisa satu persatu dengan menggunakan teknik analisis *framing* model Robert Entman. Berdasarkan analisis data yang dilakukan secara menyeluruh, memang ditemukan adanya perbedaan konstruksi antara pemberitaan surat kabar *Republika* dan *Kompas*. Perbedaan tersebut dapat dilihat melalui dua elemen besar yang diformulasikan oleh Entman, yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek-aspek tertentu, yang kemudian diperjelas lewat elemen analisis yang terbagi atas *problem identification*, *causal interpretation*, *moral evaluation*, dan juga *treatment recommendation*.

Seleksi isu berarti memilih beberapa aspek atau bagian isu tertentu dan mengabaikan sebagian yang lain. Dimensi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana media memandang sebuah peristiwa, kemudian membingkainya lewat sudut pandang tertentu untuk kemudian disajikan kepada khalayak. Sedangkan dimensi kedua yaitu penonjolan aspek-aspek tertentu dilakukan dengan berbagai strategi wacana seperti misalnya penempatan berita yang mencolok (*headline*), pengulangan grafis, pemakaian label terhadap simbol-simbol, ataupun lewat simplifikasi dan generalisasi. Masing-masing media melakukan seleksi isu dan penonjolan aspek dengan cara yang berbeda-beda, sehingga menjadi hal yang lazim bila pada akhirnya konstruksi berita yang dihasilkan juga berbeda.

Pada kasus sapi, *Republika* cenderung melakukan seleksi isu dan

senada. Cakupan isu pada kasus sapi yang ditonjolkan *Republika* terbilang cukup sempit, yaitu hanya berkisar pada persoalan internal partai. Misalnya dampak kasus sapi terhadap citra dan elektabilitas PKS; berbagai dukungan agar PKS siap menyambut Pemilu 2014; merembetnya dampak kasus sapi ke citra parpol Islam lainnya; serta rekomendasi penyelesaian kasus yang seakan hanya ditujukan untuk PKS dan parpol Islam.

Sedangkan konstruksi yang dibangun oleh *Kompas* terhadap PKS cenderung lebih luas, lugas, menyeluruh, sekaligus penuh kritik. Bagi *Kompas*, mencuatnya kasus sapi bukan hanya persoalan internal, melainkan juga permasalahan bangsa Indonesia yang tentu saja membutuhkan dukungan berbagai pihak dalam penyelesaiannya. Banyak sekali faktor yang mendukung argumen *Kompas* dalam hal tersebut, misalnya ulasan panjang mengenai bobroknnya sistem politik, minusnya sosok pemerintah yang bisa diteladani, hingga unsur agama yang ternyata terbukti tidak cukup kuat untuk menghalangi seseorang dari praktik korupsi.

Tidak hanya sampai di situ, pemberitaan *Kompas* masih terus berkembang seiring berjalannya proses persidangan pada kasus sapi. Bila awalnya *Kompas* hanya mengkritisi pemerintah serta sistem yang dinilai sudah tidak efektif, lama kelamaan *Kompas* mulai mengkritisi PKS sebagai partai Islam yang sama buruknya dengan partai politik lainnya. Terbukti dari upayanya membandingkan PKS dengan petinggi Partai Demokrat yang juga

PKS yang pada kenyataannya tak cukup kuat untuk menahan kader dari perilaku korupsi.

Sedangkan bagi *Republika*, unsur-unsur agama yang diusung parpol Islam itu memang cukup sulit untuk dijaga dan diperjuangkan sendiri. Misalnya pada artikel pemberitaan edisi 11 Februari 2013 berjudul *Konvensi Parpol Islam Mendesak*, dimana *Republika* menyarankan agar PKS melakukan konvensi dengan partai Islam lainnya serta mengajukan calon Presiden bersama di Pemilu 2014. Hal ini bisa dihitung sebagai dukungan positif *Republika* yang menginginkan adanya kemenangan partai Islam di pertarungan Pemilu 2014.

Perbedaan sudut pandang tersebut disebabkan karena *Kompas* cenderung meyakini bahwa agama dan politik di Indonesia bukanlah sebuah perpaduan yang pas. Meski agama memang tumbuh kuat dan selalu bergerak dinamis, namun itu sebatas wilayah individu dan masyarakat Indonesia dan tidak sampai mampu mengatur negara. Lagipula sekularisasi sistem politik di Indonesia semakin menguat, dimana argumentasi atau wacana yang berkembang lebih condong menjadikan Indonesia sebagai negara kebangsaan, bukan negara agama. Pada artikel edisi 20 Februari 2013 berjudul *Menimbang Partai Agama*, *Kompas* bahkan menyarankan agar format dan eksistensi parpol Islam dipikir ulang dan lebih baik dijadikan sebagai partai terbuka saja.

Republika dan *Kompas* juga menanggapi secara berbeda tuduhan

menanggapi sikap defensif PKS tersebut secara santai dan menilainya sebagai hal yang wajar dalam dunia politik. Sikap tersebut dapat diartikan sebagai dukungan *Republika* terhadap praduga PKS atas kemungkinan adanya pertarungan politik. Hal ini sekaligus menempatkan PKS sebagai korban dalam kasus sapi. Sedangkan *Kompas* justru bersikap sebaliknya. Tudingan PKS tersebut dianggap tidak pantas dilakukan oleh pihak tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Bagi *Kompas*, KPK adalah lembaga hukum yang kredibel dan tidak mungkin melakukan kesepakatan dengan lawan politik PKS. Hal ini membuktikan bahwa *Kompas* memilih untuk mengacuhkan kemungkinan adanya konspirasi politik, sekaligus menegaskan bahwa *Kompas* lebih mempercayai penegakan hukum sebagai dasar negara yang superior dalam memberantas kejahatan negara seperti perilaku korupsi.

Dukungan *Republika* terhadap PKS juga dapat dilihat dari pemilihan narasumber dalam pemberitaan-pemberitaan yang dipilih sebagai objek penelitian. Bila dicermati secara mendalam, hampir keseluruhan narasumber Islam atau ahli politik yang dipilih cenderung memberikan tanggapan positif terhadap PKS. Misalnya dalam edisi pemberitaan 20 Februari 2013 berjudul *Geopolitik PKS* yang menjelaskan tentang keberhasilan program PKS dalam sistem kaderisasi. *Kompas* justru melihat dukungan para kader yang terus mengalir untuk PKS saat kasus sapi mencuat sebagai sikap fanatik yang cenderung negatif, karena para kader seakan menutup mata dengan kesalahan yang dibuat pemimpin partainya. Penjabarannya disampaikan dalam artikel

membuktikan bahwa tidak semua narasumber Islam di *Kompas* memberikan dukungannya terhadap PKS

Berita sebagai suatu produk dari institusi media bukanlah merupakan cerminan dari realitas sosial yang sesungguhnya, namun merupakan hasil rekonstruksi media atas fakta yang telah terjadi. Rekonstruksi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang berasal dari internal maupun eksternal lembaga media yang menaunginya. Secara garis besar, faktor internal terbagi atas faktor individu, faktor rutinitas media, faktor organisasi, dan faktor ideologi, sedangkan faktor eksternalnya digolongkan ke dalam faktor ekstra media. Faktor ekstra media ini dapat diklasifikasikan lagi ke sub faktor seperti sumber berita, sumber penghasilan media, dan pemerintah.⁹⁷

Faktor-faktor tersebut bekerja secara simultan dalam mempengaruhi proses produksi berita dalam suatu institusi media. Namun demikian, tidak bisa dilakukan generalisasi bahwa faktor yang mempengaruhi proses produksi berita antara sebuah institusi media sama dengan institusi media lainnya. Hal ini dikarenakan setiap institusi media memiliki kekhasan masing-masing dalam suatu proses produksi berita, sehingga perbedaan yang dihasilkan dalam pemberitaan akhirnya dipandang sebagai hal yang lumrah.

Konstruksi pemberitaan di *Republika* sendiri tidak dapat dilepaskan dari faktor keterkaitan dan kesamaan ideologi para pendirinya yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Awalnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengidentifikasi 'musuh bersama' yaitu kelompok

minoritas yang menguasai konglomerasi media yang dengan sengaja menutupi kegiatan-kegiatan Islam secara professional. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah media Islam yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi para Muslim di Indonesia. Sehingga bukan hal yang membingungkan bila pemberitaannya cenderung pro terhadap PKS, sekalipun parpol Islam tersebut sedang tersandung kasus korupsi.

Sedangkan ideologi *Kompas* selalu didasarkan pada ajaran jurnalisme damai yang dikembangkan oleh pendirinya Petrus Kanisius Ojong (alm.) dan Jakob Oetama. *Kompas* mengedepankan cara yang santun dan elegan dalam memberikan kritik terhadap suatu keadaan, persis seperti yang dirumuskan Ibnu Hamad bahwa *Kompas* cenderung menggunakan Model Jalan Tengah (MJT), yaitu sebuah strategi menggugat secara tidak langsung, tapi disampaikan secara santun terkesan berputar-putar dan mengaburkan pesan yang hendak disampaikan.⁹⁸ Artinya pemilihan bahasa yang digunakan adalah yang sopan dan santun, tetapi orang yang diberikan kritik menyadari ada perbuatannya yang tidak benar.

Kompas juga menganut nilai dasar yang berbunyi *salus populi suprema lex* yang bermakna keselamatan dan kesejahteraan rakyat sebagai hukum tertinggi. Faktor kepemilikan dan ideologi tersebut cukup terlihat pada pemberitaannya mengenai kasus sapi, dimana *Kompas* percaya bahwa legalitas dan penegakan hukum diperlukan untuk memberantas korupsi demi melepaskan jerat kesulitan bagi masyarakat Indonesia. Kuatnya sikap kritis

⁹⁸ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa*, 2004, hal 117.

Kompas terhadap PKS selaku pelaku korupsi, juga dimaksudkan agar para parpol dan politisi berhenti membuat kekacauan dengan memakan uang negara dan rakyatnya sendiri. Sepertinya, nilai dasar itu pula yang dijadikan *Kompas* untuk melebarkan analisisnya hingga ke wilayah kritis terhadap unsur agama sebagai ideologi PKS serta eksistensi parpol Islam yang menurut *Kompas* perlu dipikirkan ulang.

Tabel 7

**Perbedaan *Frame* PKS dalam Kasus Suap Impor Daging Sapi di
Republika dan Kompas**

	<i>REPUBLIKA</i>	<i>KOMPAS</i>
<i>FRAME</i>	Kasus sapi menguji komitmen dan kredibilitas PKS sebagai partai bersih yang anti-korupsi.	PKS diasumsikan sama saja dengan partai lain yang tidak mampu melewati ujian dalam menghadapi godaan korupsi.
<i>Problem Identification</i>	Kasus sapi adalah persoalan internal yang membawa dampak negatif pada citra PKS dan partai Islam secara	Kasus sapi bukan hanya persoalan internal partai PKS, tapi juga permasalahan umum bangsa Indonesia.

	keseluruhan.	
<i>Causal Interpretation</i>	Luthfi Hasan Ishaq dan kasus sapi adalah penyebab masalah yang menjatuhkan citra PKS.	Sistem politik rusak dan tidak kuatnya faktor agama adalah penyebab masalah bagi PKS maupun partai lain yang rentan terhadap godaan korupsi.
<i>Moral Evaluation</i>	Dukungan terhadap PKS terus mengalir; Beragam faktor pemicu penyebab turunnya elektabilitas parpol Islam sebelum kasus sapi mencuat; Kritik terhadap hasil survey; Sikap KPK yang tidak adil dalam memproses kasus sapi.	Budaya korupsi di antara agamawan bukan isu baru yang mengejutkan; Perkembangan parpol Islam di dinilai tidak sejalan dengan kondisi politik di Indonesia; PKS tak pantas bersikap defensif terhadap KPK karena legitimasi dan kredibilitasnya lebih dipercaya masyarakat.
<i>Treatment Recommendation</i>	PKS dan partai Islam harus melakukan introspeksi dan evaluasi	Pemerintah harus membenahi sistem politik agar lebih efektif dan dapat

	<p>internal; Tonjolkan perilaku Islam; Membenahi sistem kepartaian; dan Melakukan konvensi antar parpol Islam.</p>	<p>terkontrol; PKS harus melakukan otokritik dan membenahi internal; Parpol secara umum menetapkan sanksi ketat terhadap kadernya yang korup serta memikirkan ulang eksistensi dan format parpol agama; Masyarakat harus mampu mengontrol kinerja parpol dan pemerintahan.</p>
--	--	--

Sumber: Hasil olah data dan analisis penelitian dari koran *Republika* dan

Kompas antara edisi 31 Januari 2012 – 31 Mei 2012